

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 5753 / 03 / HK / 2017

TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2017

TENTANG : PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BADUNG TAHUN
2016 – 2021

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan komprehensif untuk kurun waktu 5 tahun ke depan. Rencana Strategis selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) SKPD, sesuai Undang-undang - Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang - Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan sistem pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan pembentukan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Untuk melakukan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Badung ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka perlu dilaksanakan penyesuaian terhadap Renstra Perangkat Daerah. Untuk itu, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diskerpus) sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Badung wajib menyusun Renstra Tahun 2016-2021 yang memuat tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan RENSTRA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- g. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan

- Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
 - p. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - s. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);
 - t. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;
 - u. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

- Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021;
- v. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang tujuan dan kebijakan, program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyusunan perencanaan tahunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RENSTRA (Rencana Strategis) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 terdiri dari:

- | | |
|---------|---|
| Bab I | : Pendahuluan |
| Bab II | : Gambaran Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Badung |
| Bab III | : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
| Bab IV | : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan |
| Bab V | : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif |
| Bab VI | : Indikator Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD |
| Bab VII | : Penutup |

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kabupaten Badung

1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut diatas, adapun fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan antara lain :

- a. perumusan kebijakan teknis urusan kearsipan dan perpustakaan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan kearsipan dan perpustakaan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum urusan kearsipan dan perpustakaan;
- d. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan kearsipan dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas urusan kearsipan dan perpustakaan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

a. Struktur Organisasi

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris

- Kepala Sub Bag Perencanaan dan pelaporan
- Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian
- Kepala Sub Bag Keuangan

3. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan

- Kepala Seksi Pembinaan
- Kepala Seksi Pengembangan SDM

- Kepala Seksi Pengawasan
 - 4. Kepala Bidang Pengembangan Kearsipan dan Perpustakaan
 - Kepala Seksi Pengembangan Kearsipan
 - Kepala Seksi Pengembangan Perpustakaan
 - Kepala Seksi Pengembangan Budaya Gemar Membaca
 - 5. Kepala Bidang Pengelolaan arsip dan perpustakaan\
 - Kepala Seksi Akuisisi dan Preservasi Arsip
 - Kepala Seksi Pengelolaan Arsip
 - Kepala Seksi Pengelolaan Perpustakaan
 - 6. Kepala Bidang Layanan dan pelestarian
 - Kepala Seksi Layanan dan Pelestarian Arsip
 - Kepala Seksi Layanan dan pelestarian Perpustakaan
 - Kepala Seksi Otomasi dan Kerjasama
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- b. Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung sesuai Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
1. Kepala Dinas Kearsipan dan perpustakaan :
- a. menetapkan program/rencana kerja Dinas berdasarkan kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengkoordinasikan antar Instansi/Lembaga terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memimpin penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan operasional Dinas bersama Sekretaris dan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai peraturan dan perundang-undangan;
 - d. merumuskan kebijakan operasional dalam bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menetapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan;
 - f. menetapkan perumusan kebijakan sistem informasi daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan;
 - g. memimpin pembinaan pengelolaan arsip dan perpustakaan kepada perangkat daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan;
 - h. memimpin pelaksanaan pengawasan internal kepada perangkat daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan;

- i. menetapkan prosedur tetap pelaksanaan penyelamatan serta pelestarian arsip vital, arsip terjaga, dan arsip statis sebagai aset nasional yang berada di daerah;
 - j. mengkoordinasi layanan dan pemanfaatan arsip statis maupun layanan perpustakaan.
 - k. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - l. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
 - o. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - p. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
2. Sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan :
- a. merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian, perlengkapan, barang milik daerah dan pelaporan;
 - b. menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana kerja dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengkoordinasikan bidang-bidang dan para Sub Bagian dalam merumuskan program kerja dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan koordinasi antar instansi/lembaga terkait melalui kepala Dinas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. menyusun dan merumuskan langkah–langkah operasional ketatausahaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan anggaran Dinas dengan masing-masing bidang ;
- g. menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran dan memberikan pelayanan pembinaan administrasi umum;
- h. mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan sarana prasarana dan kebutuhan rumah tangga Dinas;
- i. mengkoordinasikan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, capaian kinerja dan laporan pengelolaan barang milik daerah, laporan keuangan dan laporan lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. mengevaluasi dan memonitoring pencapaian target-target kinerja dan anggaran;
- k. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- l. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, kerumahtanggaan dan kehumasan;
- m. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- n. mengkoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur;
- o. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- r. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Pembinaan dan Pengawasan :

- a. menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- f. mengkoordinasikan Pengawasan urusan kearsipan dan urusan Perpustakaan;
- g. mengkoordinasikan tugas penyelenggaraan kearsipan dan Perpustakaan;
- h. melaksanakan penyusunan kebutuhan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kearsipan dan Perpustakaan;
- i. mengevaluasi dan merumuskan kebijakan teknis pembinaan kearsipan dan Perpustakaan;
- j. Mengkoordinasikan rencana kegiatan kelompok jabatan fungsional;
- k. menyelenggarakan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kearsipan dan Perpustakaan;
- l. melaksanakan penilaian hasil pengawasan di bidang kearsipan dan Perpustakaan;
- m. mengkoordinasikan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan dan Perpustakaan;
- n. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- o. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- r. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- s. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- f. mengkoordinasikan kegiatan alih media dan reproduksi arsip;
- g. mengkoordinasikan kegiatan preservasi arsip dan perpustakaan;
- h. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan arsip statis;
- i. mengkoordinasikan kegiatan pengolahan arsip dan perpustakaan;
- j. menyelenggarakan akuisisi arsip dan perpustakaan;
- k. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- l. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- o. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Pengembangan Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
 - f. melaksanakan pengembangan kearsipan dan perpustakaan;
 - g. menyelenggarakan peningkatan kualitas kearsipan dan perpustakaan;
 - h. melaksanakan pendataan kearsipan dan perpustakaan;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan pengembangan kearsipan dan perpustakaan;
 - j. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - k. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
 - n. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
6. Bidang Layanan dan Pelestarian mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- f. menyelenggarakan layanan jasa dan informasi, otomasi dan kerjasama kearsipan dan perpustakaan;
- g. melaksanakan layanan hasil alih media dan reproduksi arsip statis;
- h. melaksanakan pelestarian arsip dan koleksi bahan perpustakaan
- i. mengkoordinasikan penataan dan penilaian penyusutan arsip
- j. melaksanakan perbaikan / preservasi bahan pustaka;
- k. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan pameran kearsipan dan perpustakaan;
- l. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- m. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- p. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.2 Sumber Daya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Jumlah pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung tahun 2017 berjumlah 99 orang termasuk THL. Adapun rincian jumlah pegawai terdiri dari :

- PNS : 97 orang
- THL : 2 orang

Secara keseluruhan potensi sumber daya manusia Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung tahun 2017 tertuang pada table 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Profil Sumber Daya Manusia Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

NO	JABATAN	ESELON				GOLONGAN				TINGKAT PENDIDIKAN						JML
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	S2	S1	Sar mud	SMA	SMP	SD	
1	Kepala Dinas				1				1		1					1
2	Sekretaris			1					1	1						1
3	Kepala Bidang			4					4	1	3					4
4	Kepala Sub Bag				3			3			3					3
5	Kepala Seksi				12			11	1	2	10					12
6	Pustakawan						1	1	2	1	2	1				4
7	Arsiparis						2						2			2
7	Staff					2	50	18								70
	Jumlah															97

Sedangkan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah tersedia cukup memadai, namun perlu ditingkatkan dari sisi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ditampilkan pada Tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2

Sarana dan Prasarana Dinas Kearsipan & Perpustakaan

No	Nama Barang	Jumlah
1	Mesin Ketik manual	5
2	Rak besi	507
3	Rak kayu	38
4	Filling besi	19
5	Filling kayu	5
6	Band kas	4
7	Lemari kaca	9
8	Globe	3
9	Alat kantor lainnya	16
10	Lemari kayu	5
11	Meja kayu	99
12	Kursi besi	249
13	Meja rapat	40
14	Meja telpon	2
15	Meja resepsionis	3
16	Meja panjang	3
17	Kursi tamu	9
18	Kursi putar	27
19	Meja komputer	10
20	Meja piket	4
21	Meja biro	29
22	Lemari es	1
23	AC unit	1
24	Kipas angin	3
25	Televisi	8
26	Wireless	3
27	Unit power supply	16
28	Dispenser	6
29	Handycam	1
30	Alat rumah tangga lain	4
31	PC unit	55
32	Laptop	22
33	Note Book	7
34	Printer	6
35	CPU	1
36	Printer	15
37	Server	1
38	Peralatan jaringan lainnya	5
39	Meja kerja pejabat eselon III	2
40	Meja kerja pejabat eselon IV	4
41	Kursi kerja pejabat eselon III	2
42	Kursi kerja pejabat eselon IV	4
43	Kursi hadap depan meja kerja pejabat eselon III	2
44	Kursi tamu di ruangan pejabat eselon III	1
45	Lemari arsip	6
46	Buffet kaca	2
47	Mesin absen	1
48	Lemari besi	1
49	Rotary filling	11
50	Meja besi	3
51	Kursi kayu	10
52	Meja podium	6

2.3 Kinerja Pelayanan Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung

Tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung cukup besar karena menangani dua bidang pelayanan yaitu pelayanan di sub sektor kearsipan dan pada sektor perpustakaan. Oleh karena itu maka dalam melaksanakan tupoksi tersebut perlu didukung oleh SDM yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas, serta dukungan anggaran baik dari APBD Kabupaten. Sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah pula menyelesaikan dokumen-dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2017
- b. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Pencapaian kinerja tahun 2011-2015 masih terbagi ke dalam dua perangkat daerah yaitu Kantor Perpustakaan Daerah dan Kantor Arsip Daerah. Pada tahun 2017, kedua Perangkat Daerah tersebut menjadi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Adapun pencapaian kinerja tersebut termuat dalam tabel 2.3 dibawah ini ;

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tahun 2011-2015

Kantor Perpustakaan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capain Target Renstra PD				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Meningkatkan pelayanan perpustakaan	Survey kepuasan masyarakat	0%	0%	0%	0%	60%					79,7
		Kecepatan waktu pelayanan	-	-	-	-	15 Menit	-	-	-	-	18 Menit
		Jumlah petugas yang dibintek	30 Orang	30 Orang	90 Orang	90 Orang	60 Orang	30 Orang	30 Orang	90 Orang	90 Orang	60 Orang
2	Meningkatkan budaya baca masyarakat	Jumlah layanan perpustakaan keliling	48 Kali	48 Kali	48 Kali	48 Kali	48 Kali	48 Kali	48 Kali	48 Kali	48 Kali	48Kali
		Jumlah perpustakaan yang dapat dilayani melalui silang layanan	0	24 Perpustak aan	33 Perpustak aan	33 Perpustak aan	66 Perpustak aan	0	24 Perpustak aan	33 Perpustak aan	33 Perpustak aan	66 Perpustak aan
3	Meningkatkan keanekaragaman bahan pustaka serta kelestariannya	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	25.177 Orang	26.567 Orang	27.957 Orang	29.347 Orang	30.743 Orang	24.817 Orang	25.841 Orang	30.462 Orang	33.969 Orang	36.305 Orang
		Jumlah bahan pustaka yang dipinjam	1.000 Exemplar	1.500 Exemplar	1.800 Exemplar	1.800 Exemplar	2.000 Exemplar	5.492 Exemplar	3.400 Exemplar	2.565 Exemplar	3.081 Exemplar	1.761 Exemplar
		Jumlah koleksi bahan pustaka	1.000 Exemplar	1.000 Exemplar	2.500 Exemplar	3.500 Exemplar	4.500 Exemplar	1.671 Exemplar	3.461 Exemplar	9.105 Exemplar	6.359 Exemplar	2.590 Exemplar

Kantor Arsip

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja					Target s/d tahun 2015	Realisasi Target s/d 2015
		2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7		8
1	Jumlah peserta bimtek kearsipan	-	-	166	132	129	233 orang	427 orang
2	Jumlah desa/kelurahan yang menerapkan aturan kearsipan	2	7	7	7	7	30 desa/kelurahan	30 desa/kelurahan
3	Jumlah SKPD yang kearsipannya baik	-	-	8	10	18	36 SKPD	36 SKPD
4	Jumlah SKPD/Desa yang menerapkan prosedur penyusutan arsip	-	-	-	-	30	30 SKPD/Desa	30 SKPD/Desa
5	Jumlah dokumen arsip statis	-	-	90	75	31	196 photo	166 photo
6	Jumlah arsip in aktif yang tertata dalam rangka akuisisi arsip	500	500	800	650	800	3686 box	4093 box
7	Berkurangnya volume arsip yang tersimpan	123	193	205	150	150	736 box	848 box
8	Jumlah arsip yang terawat	4593	4930	5780	5780	5931	5931 box	6366 box
9	Jumlah SKPD/Desa yang menerapkan pengelolaan arsip dinamis aktif	30	30	15	30	30	135 SKPD	135 SKPD
10	Jumlah SPKDYang menerapkan pengelolaan arsip in aktif	-	-	-	-	30	30 SKPD	30 SKPD
11	Jumlah dokumen arsip yang dipindahkan	-	-	-		5931 box, 23098 buku, 150 lbr photo	5931 box, 23098 buku, 150 lbr photo	5931 box, 23098 buku, 150 lbr photo
12	Jumlah pembuatan diorama dan studio film	-	-	-	-	2	2 unit	2 unit

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kabupaten Badung

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung menemui tantangan dan peluang pengembangan dalam pelayanannya. Untuk itu perlu melakukan Identifikasi masalah yang selanjutnya menganalisa secara eksternal dan internal (SWOT).

Kekuatan / strengts (S), Kelemahan / weaknesses (W), Peluang / opportunites (O) dan Ancaman / threats (T). Kondisi internal terdiri dari kekuatan / strengts (S) dan kelemahan / weaknesses (W) yang dimiliki Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung dengan pengidentifikasian sebagai berikut :

Kekuatan / strengts (S)

1. Adanya organisasi yang memiliki tugas pokok dan fungsi serta kewenangan.
2. Adanya sumber daya manusia yang tersedia.
3. Tersedianya dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung

Kelemahan / weaknesses (W)

1. Belum optimalnya pengetahuan dan ketrampilan SDM
2. Belum terkelolanya arsip dengan baik pada pencipta arsip
3. Bahan koleksi perpustakaan yang tersedia belum optimal.

Kondisi eksternal terdiri dari Peluang / opportunites (O) dan Tantangan / threats (T) yang dimiliki Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung sebagai berikut :

Peluang / opportunites (O)

1. Peraturan dan Perundangan-undangan tentang Kearsipan dan Perpustakaan
2. Pentingnya tertib arsip
3. Pentingnya Perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tantangan / threats (T)

1. Informasi Kersipan dan perpustakaan yang transparan, akuntable dan merata.
2. Meningkatnya minat baca masyarakat.
3. Pelayanan Kearsipan dan Perpustakaan yang prima

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mendukung visi dan misi Bupati. Selanjutnya, visi tersebut dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu tahunan atau lima tahunan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka mandat yang dibebankan kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung yang berkedudukan selaku unsur pelaksana otonomi daerah pemerintah Kabupaten Badung adalah membantu Bupati dalam menentukan kebijaksanaan di bidang kearsipan dan perpustakaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan memiliki tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung. Permasalahan yang dihadapi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya meliputi permasalahan internal dan eksternal.

Adapun isu-isu strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung antara lain :

- a. Belum optimalnya pelayanan kearsipan dan perpustakaan
- b. Belum optimalnya pengelolaan arsip pada Perangkat Daerah dan Desa di Kab Badung
- c. Masih rendahnya minat baca masyarakat

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Dinas Kearsipan dan perpustakaan diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab tantangan untuk mewujudkan penataan dan pengelolaan arsip dan pelayanan perpustakaan yang berkualitas. Peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM, pembinaan arsip, pelayanan sirkulasi dan perpustakaan keliling serta pembinaan dan evaluasi perpustakaan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Badung 2016–2021 telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Badung yang merupakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016 – 2021.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016–2021 adalah sebagai berikut :

“Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan Tri Hita Karana Menuju Masyarakat Yang Maju, Damai dan Sejahtera”.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 9 (Sembilan) Misi antara lain :

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *good governance* dan *clean government*.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.
5. Memperkuat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.
9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi Bali

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mengacu pada 2 lembaga yaitu lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, maka telaahan sebagai berikut:

3.3.1 Kearsipan

Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia (Renstra ANRI) Tahun 2015 – 2019 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019. Renstra ANRI Tahun 2015 – 2019 dikondisikan untuk menjawab agenda Pembangunan Nasional khususnya yang berkaitan dengan nilai – nilai luhur dan peningkatan peran serta dan fungsi arsip sebagai akuntabilitas kinerja organisasi yang merupakan kunci utama dalam penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sesuai dengan amanat Undang –Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan, ANRI wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang berskala nasional yang diterima dari :

- a. lembaga Negara;
- b. perusahaan;
- c. organisasi politik;
- d. organisasi kemasyarakatan dan
- e. perseorangan.

Disamping memiliki kewajiban dalam melaksanakan pengelolaan arsip statis ANRI juga memiliki tugas melaksanakan pembinaan kearsipan secara nasional terhadap pencipta arsip tingkat Pusat dan Daerah, Arsip Daerah Provinsi, Arsip Daerah Kabupaten/Kota dan Arsip Perguruan Tinggi.

Renstra Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bali Tahun 2013 – 2018 berpedoman pada RPJMP Provinsi Tahun 2013 – 2018 yang juga mendukung pelaksanaan pengelolaan arsip statis yang diterima dari :

- a. satuan kerja perangkat daerah provinsi dan penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi
- b. lembaga negara di daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- c. perusahaan;
- d. organisasi politik;
- e. organisasi kemasyarakatan; dan
- f. perseorangan.

Selain memiliki kewajiban dalam pengelolaan arsip statis juga memiliki tugas melaksanakan pembinaan kearsipan :

- a. pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah provinsi dan penyelenggara pemerintah daerah provinsi; dan
- b. pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan terhadap arsip daerah kabupaten/kota.

3.3.2 Perpustakaan

Mengacu pada Visi dan Misi Perpustakaan Nasional Tahun 2015-2019 adalah ***“Terwujudnya Indonesia Cerdas Melalui Gemar Membaca Dengan Memperdayakan Perpustakaan”***. Dalam upaya pencapaian Visi tersebut, adapun Misi perpustakaan Nasional sebagai berikut:

- Mewujudkan Koleksi Nasional yang lengkap dan mutakhir.
- Mengembangkan diversifikasi layanan perpustakaan berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi.
- Mengembangkan perpustakaan yang menjangkau masyarakat luas.
- Mewujudkan tenaga perpustakaan yang kompeten dan professional.

- Menggalakkan sosialisasi/promosi/pemasyarakatan gemar membaca.
- Mengembangkan infrastruktur perpustakaan Nasional modern.

RPJMN Tahun 2015-2019 merupakan acuan dan arah pembangunan yang dijalankan oleh Renstra Tahun 2015-2019. Dalam ketentuan umum Undang Undang Nomor 43 tahun 2007 Bab I disebutkan Perpustakaan Nasional adalah : Lembaga pemerintah Non Departemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintah dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan Pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian dan pusat jejaring perpustakaan serta berkedudukan di Ibu Kota Negara.

Keterkaitan antara Perpustakaan Republik Indonesia, Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bali dan Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten/kota dapat dilihat pada pasal 7, 8, dan 9 Undang undang Nomor 43 tahun 2007. Pemerintah berkewajiban mengembangkan sistem nasional perpustakaan sebagai upaya mendukung system pendidikan nasional, menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat serta menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air.

Hal ini didukung oleh kewajiban pemerintah provinsi dan kab/kota antara lain:

- Menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah.
- Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing.
- Menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Disamping memiliki kewajiban pengembangan dan ketersediaan layanan perpustakaan Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Bali, berwenang menetapkan kebijakan memberikan pembinaan, mengatur mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing, serta mengalih mediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat diwilayahnya masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan dilakukannya KLHS dalam rangka penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Menganalisis secara sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaedah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.

- b. Mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan dikaitkan dengan program pembangunan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.
- c. Merumuskan program mitigasi dan alternatif terhadap program pembangunan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.

Sesuai dengan hasil KLHS, maka dapat diidentifikasi beberapa program/kegiatan prioritas yang berdampak lingkungan :

- a. Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita;
- b. Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura;
- c. Mendorong pengembangan PKLp Jimbaran, Kedonganan, Benoa, dan Tanjung Benoa;
- d. Mendorong pengembangan Agropolitan Petang;
- e. Pembangunan jalan bebas hambatan;
- f. Pengembangan dan pembangunan terminal;
- g. Penataan DAS Tukad Ayung, Tukad Mati dan Tukad Penet;
- h. Pengembangan pengelolaan limbah domestic terpadu;
- i. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa;
- j. Pengembangan kawasan pariwisata;
- k. Pengembangan kawasan pertanian modern;
- l. Pengembangan kawasan industri; dan
- m. Pengembangan kawasan perikanan.

Adapun maksud dilaksanakannya tahapan pengkajian ini adalah untuk menganalisis dampak positif dan negatif terhadap indikasi program prioritas dari RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021. Demikian juga terhadap program-program yang berpotensi menimbulkan dampak atau resiko lingkungan hidup yang akan dimuat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Analisis dimaksud dilakukan dengan memperhatikan kecenderungan perkembangan dimasa yang akan datang serta kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan.

Kajian pengaruh dilakukan dengan memilih program prioritas yang memiliki keterkaitan dengan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan dan memberikan penilaian pengaruh negatif atau positif lalu mendeskripsikan pengaruh tersebut. Selanjutnya menganalisis pengaruh kumulatif dengan disertai usulan adaptasi/mitigasi.

Tabel 4.1 Identifikasi Program Prioritas

Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Program Prioritas	Pencemaran Air dan Polusi Udara	Degradasi Lahan/hutan	Permasalahan Sampah	Degradasi Pantai	Kegiatan Yang terkait dengan Isu Pembangunan Berkelanjutan
1. Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita	1	0	1	0	1. Pembangunan jalan 2. Pembangunan pusat perdagangan dan jasa 3. Pembangunan drainase 4. Pembangunan sarana/prasarana pengelolaan limbah dan sampah

2. Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura	1	1	1	0	1.Pembangunan jalan 2.Pembangunan pusat perdagangan dan jasa 3.Pembangunan drainase 4.Pembangunan sarana/prasarana pengelolaan limbah dan sampah
3. Mendorong pengembangan PKLp Jimbaran, Kedonganan, Benoa, dan Tanjung Benoa	1	0	1	1	1.Pembangunan jalan 2.Pembangunan pusat perdagangan dan jasa 3.Pembangunan drainase 4.Pembangunan sarana/prasarana pengelolaan limbah dan sampah

Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Program Prioritas	Pencemaran Air dan Polusi Udara	Degradasi Lahan/hutan	Permasalahan Sampah	Degradasi Pantai	Kegiatan Yang terkait dengan Isu Pembangunan Berkelanjutan
4. Pengembangan Agropolitan Petang	0	1	1	0	1. Pembangunan terminal 2. Pembangunan Pasar
5. Pembangunan jalan bebas hambatan	0	1	0	0	1. Pengembangan kawasan
6. Pengembangan dan pembangunan terminal	0	1	0	0	1. Pembangunan jalan 2. Pengembangan kawasan
7. Penataan DAS Tukad Ayung, Tukad Mati dan Tukad Penet	1	0	0	1	1. Pengembangan kawasan
8. Pengembangan pengelolaan limbah domestik terpadu	1	0	0	1	1. Pengembangan pelayanan sanitasi perkotaan
9. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	1	1	1	0	1. Perluasan permukiman 2. Pembangunan jalan

10. Pengembangan kawasan pariwisata	1	0	1	1	1.Pembangunan jalan 2.Pembangunan akomodasi wisata
11.Pengembangan kawasan pertanian modern	1	1	0	0	1.Pembangunan jalan 2.Pengembangan pasar
12. Pengembangan kawasan industri kerajinan rakyat dan UMKM	1	1	1	0	1.Pengembangan permukiman 2.Pembangunan jalan
13.Pengembangan kawasan perikanan	1	0	1	1	1.Pengembangan pasar ikan

Berdasarkan analisis pengaruh kumulatif diatas, selanjutnya dilakukan penilaian terhadap masing-masing program prioritas yang dikaitkan dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan serta mendeskripsikannya sesuai dengan nilai yang diberikan. Adapun hasil penilaian dan pendeskripsian tersebut dituangkan dalam Tabel berikut:

Tabel 4.2 Penilaian dan Pendeskripsian Pengaruh

Program Prioritas	Daftar Isu-Isu PB							
	Pencemaran Sungai/Pantai		Degradasi lahan/hutan		Masalah Sampah		Degradasi pantai-	
	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi
1. Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan	-	Infrastruktur pendukung /jaringan kawasan akan memperpadat kawasan	-	Penurunan daerah resapan dan kualitas tutupan lahan	+	Peningkatan aktivitas dan mobilitas penduduk	+	Peningkatan akses dan aktivitas di kawasan pantai

Sarbagita		dan penurunan kualitas tutupan lahan						
2. Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura	+	Peningkatan berbagai aktivitas layanan, permukiman dan perdagangan	-	Peningkatan alih fungsi lahan disekitar kawasan	+	Peningkatan berbagai aktivitas layanan, permukiman dan perdagangan	0	Kemungkinan tidak berpengaruh
3. Mendorong pengembangan PKLp Jimbaran, Kedonganan, Benoa, dan Tanjung Benoa	+	Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata	+	Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata	+	Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata	+	Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata
4. Pengembangan Agropolitan Petang	-	Peningkatan intensitas usaha yang menghasilkan limbah	+	Penataan kawasan dengan paying hokum dan sarana /prasarana	+	Penataan kawasan	0	Tidak berdampak penting
5. Pembangunan jalan bebas hambatan	0	Tidak berdampak penting	-	Alih fungsi lahan/penggunaan lahan produktif	0	Tidak berdampak penting	0	Tidak berdampak penting
6. pengembangan dan pembangunan terminal	-	Peningkatan Intnsitas dan mobilitas di terminal	+	Alih fungsi lahan disekitarnya	-	Peningkatan Intnsitas dan mobilitas di terminal	0	Tidak berdampak penting
7. Penataan DAS Tukad Ayung, Tukad Mati dan Tukad Penet	++	Penataan DAS mengurangi tekanan beban limbah ke sungai	+	Menghindari alih fungsi DAS	+	Penataan DAS mengurangi pembuangan sampah ke sungai	+	Penataan DAS mengurangi masuknya limbah dan sampah ke

								pantai
8. Pengembangan pengelolaan limbah domestik terpadu	++	Pengolahan terpadu mengurangi tekanan beban limbah ke sungai	0	Tidak berdampak penting	+	Tidak berdampak penting	++	Pengolahan terpadu mencegah pencemaran air laut
9. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	0	Limbah dihasilkan dari peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa	-	Alih fungsi lahan disekitar kawasan	0	Sampah dihasilkan dari peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa	0	Tidak berdampak penting
10. Pengembangan kawasan pariwisata	0	Air limbah dari akomodasi wisata	+	Penataan kawasan pariwisata	0	Sampah dari aktivitas pariwisata	0	Ancaman sepadan dan ekosistem pantai
11. pengembangan kawasan pertanian modern	--	Pencemaran air karena penggunaan bahan kimia	+	Penataan kawasan dengan payung hukum dan sapras yang layak	0	Tidak berdampak penting	0	Tidak berdampak penting
Program Prioritas	Daftar Isu-Isu PB							
	Pencemaran Sungai/Pantai		Degradasi lahan/hutan		Masalah Sampah		Degradasi pantai-	
	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi
12. pengembangan kawasan industri kerajinan dan UMKM	--	Air limbah yang dihasilkan berbagai aktivitas industri mengancam ekosistem	0	Alih fungsi lahan produktif dan pengembangan kawasan permukiman	--	Berbagai macam sampah yang dihasilkan berbagai aktivitas industri	0	Penurunan kualitas air laut disekitarnya

		perairan						
13. Pengembangan kawasan perikanan	--	Air limbah dari pasar dan pengolahan ikan	0	Tidak berdampak penting	-	Sampah dari aktivitas pasar ikan	--	Tekanan ekoistem pantai dari padatnya aktivitas perikanan

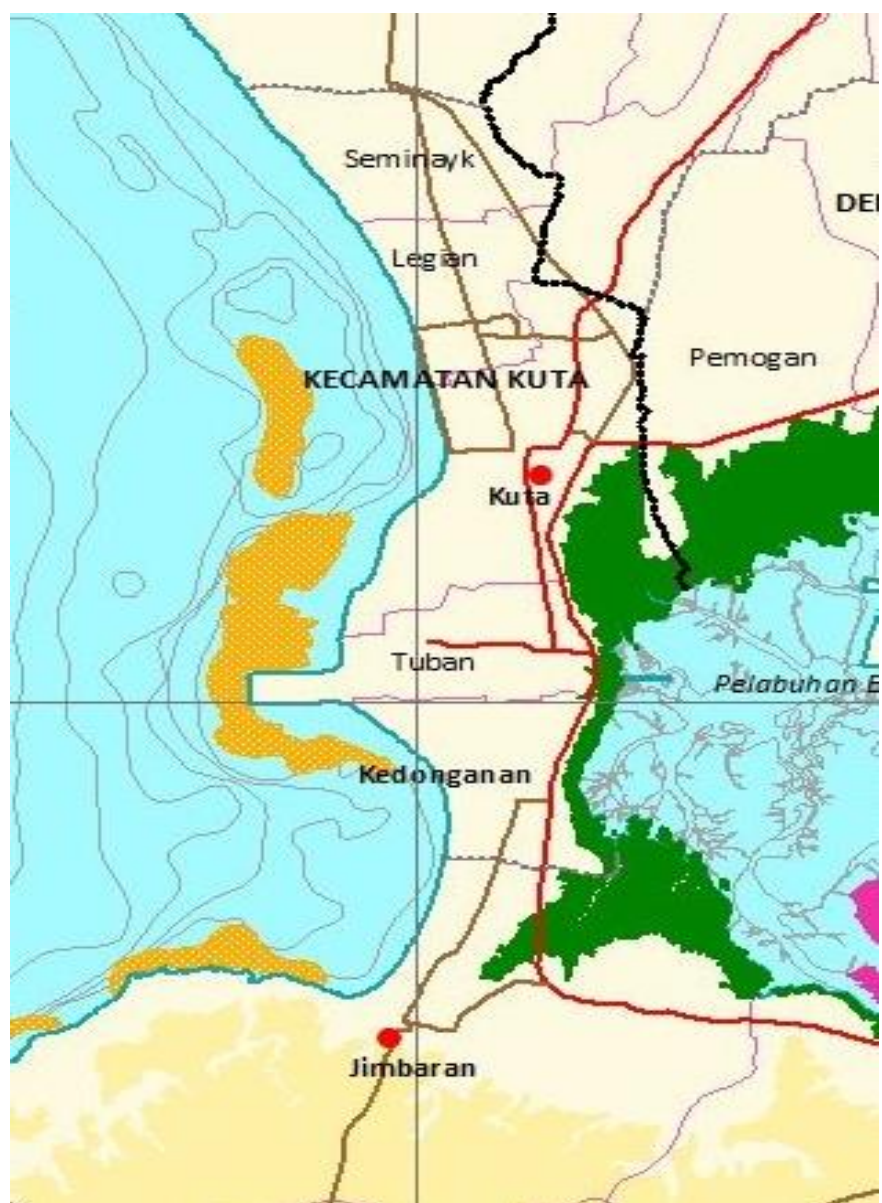
Disamping itu pula dilakukan diidentifikasi perkiraan pengaruh khususnya dampak negatif suatu program prioritas terhadap suatu isu pembangunan berkelanjutan serta diuraikan mitigasi yang dapat dilakukan. Analisis dampak tersebut dituangkan kedalam Tabel berikut :

Tabel 4.3 Analisis Pengaruh Negatif Program 1

Isu Pembangunan Berkelanjutan :		
Pencemaran Sungai/Pantai		
Deskripsi Baseline : Infrastruktur pendukung /jaringan kawasan akan memperpadat kawasan dan penurunan kualitas tutupan lahan		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita	1. Perkiraan pengaruh langsung adalah peningkatan jumlah limbah yang masuk ke sistem perairan. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan limbah sampah yang mengancam pendangkalan dan pencemaran. 2. Penyebabnya adalah pembangunan	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengolahan air limbah domestik terpadu dan penerapan standar pengolahan limbah

	infrastruktur serta pengembangan permukiman 3. Lokasinya di wilayah Kuta dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung selama terjadinya gangguan dari kegiatan, dapat terjadi pemulihan, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam.	kegiatan usaha tertentu
Pengaruh kumulatif		
1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta perkotaan modern dengan infrastruktur yang memadai termasuk pengolahan limbah dan sampah. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan limbah akan terus memperburuk sanitasi kawasan, estetika yang kumuh serta terancam kepunahan biota laut. 2. Dampak positif berupa peningkatan akses dan perekonomian bagi masyarakat kuta dan sekitarnya, sementara dampak negative selain masyarakat Kuta dan sekitarnya akan berdampak pada nelayan, dan generasi penerus karena kerusakan lingkungan yang parah.		

Gambar 4.1 Penyangga dan Potensi Ekologis Kuta dan sekitarnya



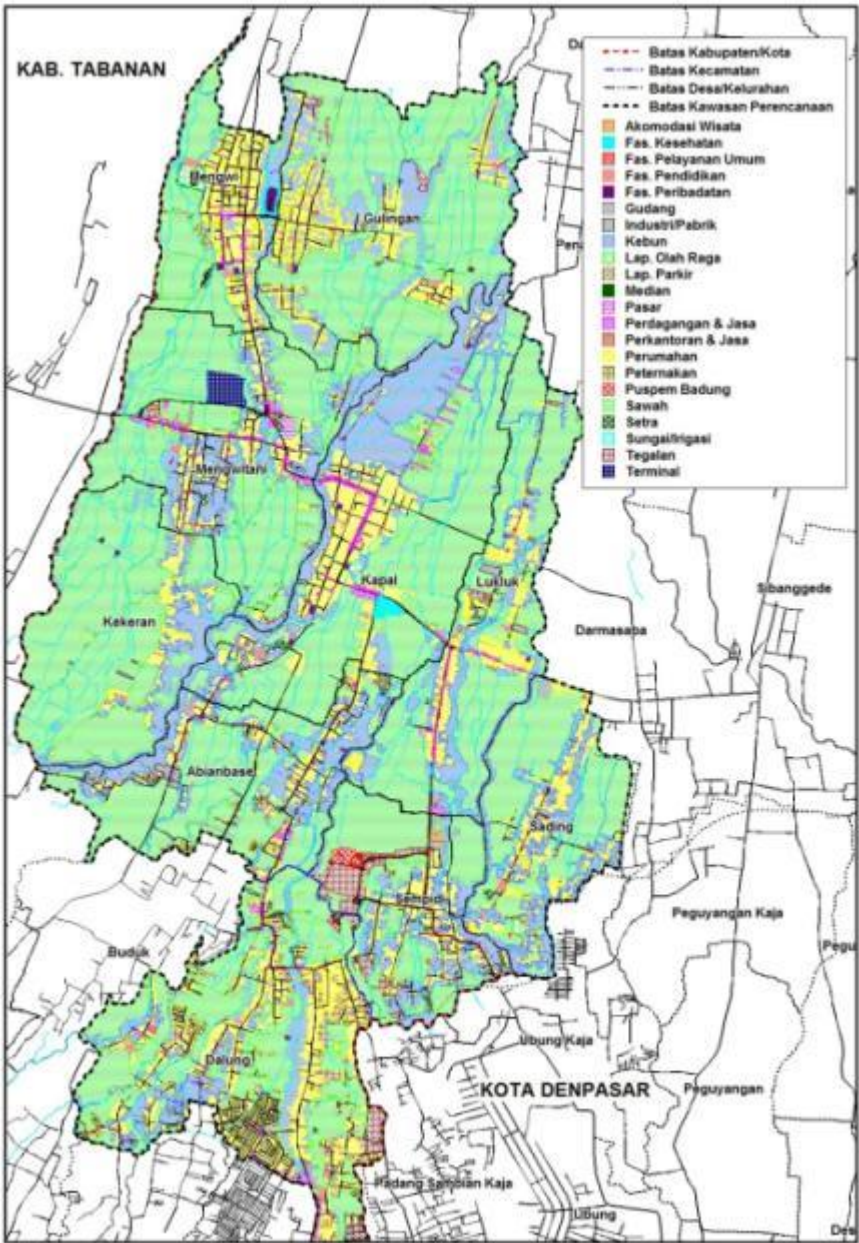
Tabel 4.4 Analisis Pengaruh Negatif Program 2

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Degradasi lahan/hutan			
Deskripsi Baseline : Penurunan daerah resapan dan kualitas tutupan lahan			
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan			
Program RPJMD Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Prioritas Semesta	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita		1. Perkiraan pengaruh langsung adalah alih fungsi lahan. 2. Pengaruh tidak langsung adalah kualitas fungsi lahan sebagai daerah resapan berkurang 3. Lokasinya di wilayah Kuta dan Kuta Utara dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada penetapan kualitas ruang terbuka hijau.	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan penetapan presentasi ruang terbuka hijau dan peningkatan kualitasnya.
Pengaruh kumulatif			
3. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta perkotaan modern dengan infrastruktur yang memadai termasuk penetapan presetase ruang yang berfungsi sebagai daerah resapan dan ruang terbuka hijau, situasi terburuk adalah rendahnya daerah resapan yang berdampak pada daerah renta banjir. 4. Dampak positif berupa kawasan tertata dengan ruang terbuka hijau yang layak, menjaga iklim mikro yang baik serta mencegah kawasan rentan banjir.sementara dampak negative selain masyarakat Kuta dan sekitarnya akan berdampak pada wilayah sekitarnya, dampak perubahan iklim semakin terasa dan kualitas udara memburuk.			

Tabel 4.5 Analisis Pengaruh Negatif Program 3

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Degradasi lahan/hutan			
Deskripsi Baseline : Peningkatan alih fungsi lahan disekitar kawasan			
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan			
Program RPJMD Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Prioritas Semesta	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura		1. Perkiraan pengaruh langsung adalah alih fungsi lahan produktif 2. Pengaruh tidak langsung adalah kualitas fungsi lahan sebagai daerah pertanian dan resapan berkurang 3. Lokasinya di wilayah Mengwi dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada penetapan daerah pertanian abadi dan kualitas ruang terbuka hijau.	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pembatasan alih fungsi dan penetapan daerah pertanian abadi RTH.
Pengaruh kumulatif			
1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta pusat pemerintaahn dan perkotaan modern dengan infrastruktur yang memadai termasuk penetapan daerah pertanian abadi, presetase ruang yang berfungsi sebagai daerah resapan dan ruang terbuka hijau, situasi terburuk adalah menurunnya daerah pertanian, rendahnya daerah resapan yang berdampak pada daerah renta banjir. 2. Dampak positif berupa kawasan tertata dengan ruang terbuka hijau yang layak, menjaga iklim mikro yang baik serta mencegah kawasan rentan banjir serta tetap terjaga produksi pertanian. sementara dampak negative selain masyarakat Mengwidan sekitarnya akan berdampak pada wilayah sekitarnya, dampak perubahan iklim semakin terasa dan kualitas udara memburuk.			

Gambar 4.2 Posisi Strategis Kabupaten Badung sebagai peluang dan ancaman lingkungan



Tabel 4.6 Analisis Pengaruh Negatif Program 4

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Pencemaran Sungai/Pantai			
Deskripsi Baseline : Peningkatan intensitas usaha yang menghasilkan limbah			
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan			
Program RPJMD Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Prioritas Semesta	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pengembangan Agropolitan Petang		1. Perkiraan pengaruh langsung adalah peningkatan jumlah limbah yang mengandung residu pupuk kimia dan pestisida mencemari system perairan. Sementara pengaruh tidak langsung adalah dampak akumulasi menimbulkan kepunahan biota dan gangguan kesehatan manusia. 2. Penyebabnya adalah pola pertanian intensif yang menggunakan bahan kimia secara luas. 3. Lokasinya di wilayah Kecamatan Petang kearah hilir 4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada upaya control dan pola tanam yang ramah lingkungan terjadi pemulihan, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam.	Untuk meminimalkan dampak harus diterapkan pola tanam yang ramah lingkungan.
Pengaruh kumulatif			
1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta agropolitan yang mampu menjaga produksi pertanian dan peningkatan ekonomi wilayah/perdesaan dengan tidak merusak sumberdaya lahan dan air. Namun kemungkinan terburuk adalah kawasan agropolitan menjadi sumber pencemaran air dan ancaman lingkungan dan manusia yang terkena dampak. 2. Dampak positif berupa peningkatan perekonomian bagi masyarakat kuta dan sekitarnya, sementara dampak negative timbulnya pencemaran air yang mengancam wilayah di hilir.			

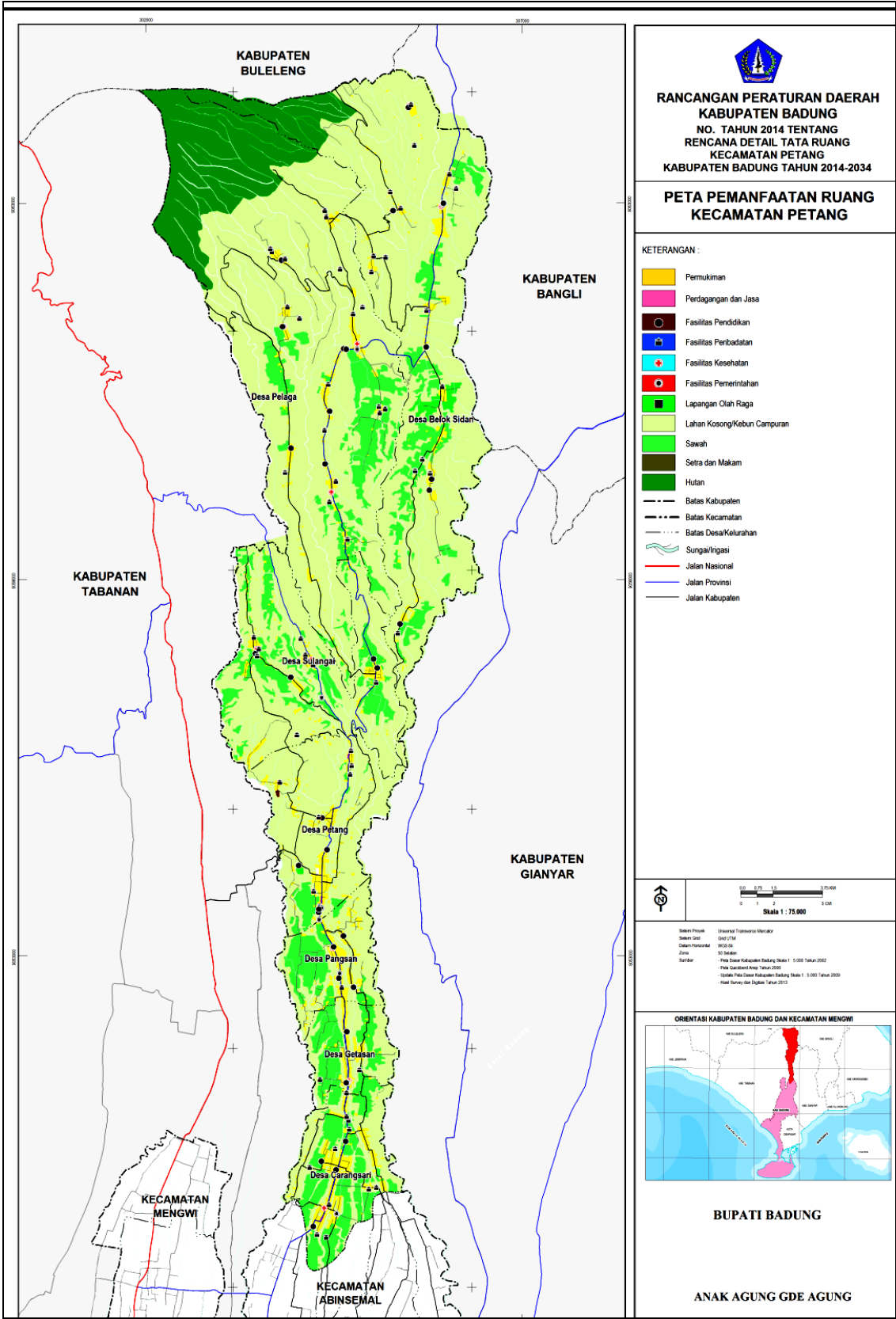
Tabel 4.7 Analisis Pengaruh Negatif Program 5

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Degradasi lahan/hutan			
Deskripsi Baseline : Peningkatan alih fungsi lahan dan pengurangan lahan produktif			
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan			
Program RPJMD Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Prioritas Semesta	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pembangunan jalan bebas hambatan		1. Penggunaan lahan pertanian sebagai jalan, pengaruh langsung adalah alih fungsi lahan produktif 2. Pengaruh tidak langsung adalah adanya pengembanan permukiman, pusat perdagangan baru di sekitar jalan sehingga terus mendorong alih fungsi lahan. 3. Lokasi rencana jalan bebas hambatan Kuta- Tanah Lot- Soka , Canggu – Mengwi, lingkaran Mengwi , Batuan – Purnama dan jalan primer arteri di pusat perkotaan Mangupura wilayah dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada penetapan daerah pertanian abadi dan penutupan ruas tertentu dari akses jalan.	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pembatasan alih fungsi dan penetapan daerah pertanian abadi ruang terbuka hijau.
Pengaruh kumulatif			
3. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta infrastruktur jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di Kabupaten Badung maupun antar kabupaten. Kawasan pertanian dan resapan tetap terjaga, situasi terburuk adalah menurunnya daerah pertanian, rendahnya daerah resapan yang berdampak pada daerah rentan banjir, memicu timbulnya daerah-daerah dengan kepadatan dan kemacetan lalu lintas. 4. Dampak positif akan dirasakan oleh masyarakat yang sebelumnya tidak dilalui jalan, peningkatan perekonomian dengan dibuka akses jalur pariwisata, penjualan produk pertanian serta arus keluar masuk logistik dan berkembangnya daerah/pusat perdagangan baru khususnya di Sarbagita, pusat pemerintahan kabupaten dan Badung utara. Terjaga ruang terbuka hijau dan lahan produktif. sementara dampak negatif akan ada alih fungsi lahan dan muncul pusat-pusat kepadatan baru yang dapat berdampak pada sosial kemasyarakatan.			

Tabel 4.8 Analisis Pengaruh Negatif Program 6

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Degradasi lahan/hutan			
Deskripsi Baseline : Peningkatan alih fungsi lahan dan pengurangan lahan produktif			
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan			
Program RPJMD Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Prioritas Semesta	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Perkembangan pusat perdagangan dan jasa		1. Pengembangan pusat perdagangan dan jasa berdampak secara langsung adalah alih fungsi lahan produktif 2. Pengaruh tidak langsung adalah adanya pengembanan permukiman dan kawasan kepadatan baru dan sekitarnya sehingga terus mendorong alih fungsi lahan. 3. lokasinya di Badung Selatan (Jimbaran, Kedonganan, uluatu), Mengwi dan sekitarnya. 4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada penetapan kawasan pertanian abadi dan penataan kawasan.	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pembatasan alih fungsi dan penetapan daerah pertanian abadi ruang terbuka hijau.
Pengaruh kumulatif			
1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta pemerataan perekonomian dengan akses yang cepat dan lengkap di seluruh Kabupaten Badung daerah pertanian dan reapan tetap terjaga, situasi terburuk adalah munculnya pusat-pusat kepadatan dan kemacetan baru, menurunnya daerah pertanian, rendahnya daerah resapan yang berdampak pada daerah rentan banjir, memicu timbulnya daerah daerah dengan kepadatan dan kemacetan lalu lintas. 2. Dampak positif akan dirasakan oleh masyarakat pemerataan akan akses perdagangan dan jasa, peningkatan perekonomian dengan dibuka pusat-pusat perdagangan dan jasa baru.Sementara dampak negatif akan ada alih fungsi lahan dan muncul pusat-pusat kepadatan baru yang dapat berdampak pada sosial kemasyarakatan.			

Gambar 4.3 Potensi Agribisnis Petang sekaligus daerah resapan



Tabel 4.9 Analisis Pengaruh Negatif Program 7

Isu Pembangunan Berkelanjutan :			
Pencemaran Sungai/Pantai			
Air limbah yang dihasilkan berbagai aktivitas industri mengancam ekosistem perairan			
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan			
Program RPJMD Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Prioritas Semesta	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pengembangan Agropolitan Petang		1. Perkiraan pengaruh langsung adalah besarnya jumlah limbah yang masuk ke system perairan. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan limbah sampah yang mengancam kesehatan dan lingkungan. 2. Penyebabnya adalah aktivitas industry yang intensif menggunakan bahan kimia dengan limbah yang besar. 3. Lokasinya di wilayah Mengwi dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung jika tidak dilakukan upaya pengolahan limbah yang efektif memenuhi baku mutu yang ditentukan. dapat terjadi pemulihan, jika limbah yang dibuang memenuhi baku mutu /tidak menimbulkan pencemaran, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam.	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengolahan air limbah industri yang memenuhi baku mutu yang ditentukan.
Pengaruh kumulatif			
1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah terwujudnya Kabupaten Badung dengan pusat industri yang mampu memenuhi kebutuhan dan ekspor hasil industri tertentu. Infrastruktur industry yang memadai termasuk pengolahan limbah dan sampah. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan limbah akan memperburuk lingkungan kawasan dan daerah sekitarnya, pencemaran air, gangguan kesehatan dan lingkungan. 2. Dampak positif berupa pemenuhan akan hasil industry tertentu, dan perekonomian dan pendapatan, sementara dampak negative akan dirasakan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengancam keanekaragaman hayati ekosistem perairan, gangguan kesehatan dan estetika kawasan dan sekitarnya.			

Tabel 4.10 Analisis Pengaruh Negatif Program 8

Isu Pembangunan Berkelanjutan :			
Masalah Sampah			
Berbagai macam sampah yang dihasilkan berbagai aktivitas industry			
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan			
Program RPJMD Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Prioritas Semesta	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pengembangan kawasan industri kecil dan UMKM		1. Perkiraan pengaruh langsung adalah besarnya jumlah sampah/lmbah padat yang dihasilkan industri memicu pencemaran lingkungan dan estetika kawasan dan sekitarnya yang buruk. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan/penanganan sampah yang tidak baik menimbulkan pencemaran lingkungan perairan. 2. Penyebabnya adalah aktivitas industri yang intensif menggunakan berbagai bahan baku dengan sampah limbah yang besar. 3. Lokasinya di wilayah Mengwi dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung jika tidak dilakukan upaya pengelolaan sampah dan limbah padat yang tepat tuntas dan efektif. pemulihan, jika pengelolaan sampah yang efektif diterapkan sehingga tidak menimbulkan dampak langsung maupun tak langsung dan tidak menimbulkan pencemaran, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam.	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengelolaan sampah dan limbah padat industri yang efektif.
Pengaruh kumulatif			
1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah terwujudnya Kabupaten Badung dengan pusat industry yang mampu memenuhi kebutuhan dan ekspor hasil industri tertentu. Infrastruktur industri yang memadai termasuk pengolahan sampah dan limbah padat. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan limbah padat akan memperburuk lingkungan kawasan dan daerah sekitarnya, pencemaran air, gangguan kesehatan dan lingkungan. 2. Dampak positif berupa pemenuhan akan hasil industri tertentu, dan perekonomian dan pendapatan, sementara dampak negative akan dirasakan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengancam keanekaragaman hayati ekosistem perairan, gangguan kesehatan dan estetika kawasan dan sekitarnya.			

Tabel 4.11 Analisis Pengaruh Negatif Program 9

Isu Pembangunan Berkelanjutan :			
Pencemaran air dan Masalah Sampah			
Besarnya limbah cair dan sampah yang dihasilkan dari aktivitas/pasar ikan			
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan			
Program RPJMD Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Prioritas Semesta	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pengembangan kawasan Perikanan		1. Perkiraan pengaruh langsung adalah besarnya jumlah sampah/lmbah cair yang dihasilkan pasar ikan memicu pencemaran lingkungan dan estetika kawasan dan sekitarnya yang buruk. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan/penanganan sampah yang tidak baik serta akumulasi bahan pencemar menimbulkan pencemaran lingkungan pantai 2. Penyebabnya adalah aktivitas pasar ikan yang padat dengan pencucian ikan dan pemrosesan ikan menghasilkan limbah dan sampah yang besar. 3. Lokasinya di wilayah Kedonaganan dan Mengwi. 4. Pengaruh akan berlangsung jika tidak dilakukan upaya pengelolaan sampah dan limbah yang tepat tuntas dan efektif. pemulihan, jika pengelolaan sampah yang efektif diterapkan sehingga tidak menimbulkan dampak langsung maupun tak langsung dan tidak menimbulkan pencemaran pantai dan estetikan kawasan, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam.	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengelolaan sampah dan limbah cair perikanan (pasar ikan).

Pengaruh kumulatif
3. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah terwujudnya Kabupaten Badung dengan kawasan perikanan yang mampu memenuhi kebutuhan ikan dan ekspor hasil perikanan. Infrastruktur pasar ikan yang memadai termasuk pengolahan sampah dan limbah cair. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan limbah cair akan memperburuk lingkungan kawasan dan daerah sekitarnya, pencemaran pantai, dampak buruk bagi pariwisata daerah sekitarnya, gangguan kesehatan dan lingkungan. 4. Dampak positif berupa pemenuhan akan hasil dari aktivitas perikanan(pasar ikan), dan perekonomian dan pendapatan, sementara dampak negative akan dirasakan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengancam ekosistem pantai, gangguan kesehatan dan kawasan pariwisata sekitarnya.

4.3.2 Integrasi Rekomendasi KLHS kedalam Program RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021

Upaya pengembangan mitigasi /adaptasi dan/atau alternatif adalah untuk meningkatkan kualitas program RPJMD Semesta Berencana dalam menunjang visi,misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Badung dengan semangat pembangunan berkelanjutan. Usulan-usulan tambahan kebijakan/rencana/program untuk meminimalkan atau mengurangi potensi pengaruh negatif yang diprediksi sebagai dampak program. Alternatif adalah usulan-usulan pengganti kebijakan /rencana /program untuk menghilangkan atau mengurangi pengaruh negatif yang diprediksi akan timbul.

Pokja melakukan kegiatan ini dengan melibatkan pemangku kepentingan,termasuk narasumber dan para pakar serta dengan tim penyusun RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung. Kegiatan tersebut berupa *Focussed Group Disscation* (FGD), *workshop*, panel ataupun forum lain yang dianggap perlu untuk dilakukan. Perumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung dirumuskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.12 Perumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif RPJMD

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif	
			Mitigasi	Alternatif
1	Pengembangan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup metropolitan Sarbagita	1. Dampak terhadap kepadatan dan kemacetan lalu lintas di Kuta dan sekitarnya 2. Dampak menurunnya luas ruang terbuka hijau 3. Dampak terhadap ancaman pencemaran lingkungan perairan (air tanah, sungai dan laut). 4. Dampak sosial-kemasyarakatan dan budaya masyarakat dan lembaga adat Kuta	1. Pengembangan infrastruktur yang layak dengan kapasitas/daya tampungnya 2. Menjaga ruang terbuka hijau dan menetapkan ruang terbuka hijau yang representatif 3. Mendorong kepatuhan/ketaatan terhadap pengelolaan limbah/sampah dan menegakan baku mutu yang ditentukan 4. Menjaga kelestarian budaya dan kearifan lokal yang sudah ada dan tumbuh sejak lama	1. Pembatasan /pelarangan moda transportasi tertentu masuk kawasan 2. penetapan ruang terbuka hijau
2	Pengembangan Kawasan Perkotaan Mangupura	1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah. 2. Berdampak pada peningkatan kepadatan dan kemacetan lalu lintas. 3. Dampak terhadap munculnya perkampungan kumuh perkotaan 4. Dampak pencemaran sungai dan permasalahan sampah	1. Penetapan sawah abadi. 2. Penyiapan infrastruktur modern dan pengaturan lalu lintas 3. Penetapan standar sistem sanitasi rumah tangga,perumahan dan kegiatan	1.integrasi penerapan sistem pengelolaan sampah/ limbah dalam perizinan kegiatan usaha dan perumahan

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif	
			Mitigasi	Alternatif
			usaha 4. Penetapan sistem pengelolaan sampah yang representatif dan standar pengolahan air limbah	
3	Pengembangan Agropolitan	1. Dampak terhadap alih fungsi lahan 2. Dampak terhadap pemanfaatan berlebihan sumber daya air 3. Dampak terhadap polusi udara dari penggunaan mesin pertanian dan perkembangan transportasi. 4. Dampak hama/penyakit dari pengembangan pertanian intensif	1. Penetapan kawasan pertanian dan permukiman terbatas 2. Penerapan teknologi penggunaan sumberdaya air alternatif (air hujan). 3. penerapan sistem pertanian ramah lingkungan. 4. integrasi dampak perubahan iklim kedalam pola tanam petani	1. peningkatan kesejahteraan petani sehingga petani menjadi primadona mata pencaharian masyarakat setempat 2. Pengembangan pertanian organik
4	Pembangunan jalan bebas hambatan/ TOL; Kuta-Canggu-Tanah Lot. Mengwi-Batuan-Purnama	1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah 2. Dampak adanya peningkatan alih fungsi lahan. 3. Dampak terhadap gangguan sistem subak	1. Menghindari penggunaan sawah produktif besar-besaran 2. Menutup/mbatasi akses percabangan jalan TOL.	1. Pembangunan Jalan layang pada ruas-ruas tertentu untuk menjaga sistem subak.
5	Pengembangan Kawasan Industri	1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah 2. Dampak adanya	1. Menghindari penggunaan sawah produktif besar-	1. penetapan kawasan industri

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif	
			Mitigasi	Alternatif
		peningkatan alih fungsi lahan. 3. Dampak terhadap gangguan sistem subak. 4. Dampak pencemaran lingkungan 5. Dampak sosial-kemasyarakatan	besaran 2. Penetapan sawah abadi dengan sistem subaknya. 3. Penetapan industri jenis tertentu dengan kajian kelayakan lingkungan 4. Penerapan industri dengan sistem pengolahan limbah/sampah dan penerapan baku mutu lingkungan secara ketat.	khusus
6	Pengembangan Kawasan Perikanan	1. Dampak terhadap pencemaran pantai. 2. Dampak/gangguan terhadap daerah wisata sekitarnya 3. Dampak kepadatan lalu lintas di kawasan dan sekitarnya.	1. Pembangunan infrastruktur sanitasi/kebersihan yang memadai. 2. Mendorong masyarakat menjaga kebersihan kawasan 3. Pembangunan infrastruktur; jalan dan areal parkir yang memadai 4. Memberi jarak/radius ruang kawasan dengan daerah wisata terdekat	1. Pembangunan kawasan perikanan khusus

4.3.2 Rumusan Integrasi Kedalam Rekomendasi

Tim penyusun KLHS berkoordinasi dengan tim perumus program dalam SKPD menyusun rumusan rekomendasi berdasarkan rumusan upaya mitigasi dan atau alternative yang telah disusun sebelumnya. Adapun pengintegrasian kedalam rumusan rekomendasi ditampilkan dalam Tabel berikut:

Tabel 4.13

Perumusan Integrasi KLHS kedalam RPJMD Tahun 2016 - 2021

Kabupaten Badung

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif		Rekomendasi
			Mitigasi	Alternatif	
1	Pengembangan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup metropolitan Sarbagita	1. Dampak terhadap kepadatan dan kemacetan lalu lintas di Kuta dan sekitarnya 2. Dampak menurunnya luas ruang terbuka hijau 3. Dampak terhadap ancaman pencemaran lingkungan perairan (air tanah, sungai dan laut). 4. Dampak sosial-kemasyarakatan dan budaya masyarakat dan lembaga adat Kuta	1. Pengembangan infrastruktur yang layak dengan kapasitas/ dayaampungnya 2. Menjaga ruang terbuka hijau dan menetapkan ruang terbuka hijau yang representatif 3. Mendorong kepatuhan/ketaatan terhadap pengelolaan limbah/sampah dan menegakan baku mutu yang ditentukan 4. Menjaga kelestarian budaya dan kearifan lokal yang sudah ada dan tumbuh sejak lama	1. Pembatasan/pelarangan moda transportasi tertentu masuk kawasan 2. penetapan ruang terbuka hijau	Pengembangan infrastruktur Kuta sebagai bagian dari metropolitan Sarbagita mempertimbangkan ruang, mutu kelayakan, kapasitas dan budaya
2	Pengembangan Kawasan Perkotaan	1. Dampak terhadap penggunaan	1. Penetapan sawah abadi.	1. integrasi penerapan sistem	Pengembangan konsep kota taman yang

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif		Rekomendasi
			Mitigasi	Alternatif	
	Mangupura	lahan sawah. 2. Berdampak pada peningkatan kepadatan dan kemacetan lalu lintas. 3. Dampak terhadap munculnya perkampungan kumuh perkotaan 4. Dampak pencemaran sungai dan permasalahan sampah	2.Penyiapan infrastruktur modern dan pengaturan lalu lintas 3.Penetapan standar sistem sanitasi rumah tangga,perumahan dan kegiatan usaha 4.Penetapan sistem pengelolaan sampah yang representatif dan standar pengolahan air limbah	pengelolaan sampah/limbah dalam perizinan kegiatan usaha dan perumahan	mengintegrasikan system sawah dan DAS serta menjaga nilai social kemasyarakatan yang telah tumbuh.
3	Pengembangan Agropolitan	1. Dampak terhadap alih fungsi lahan 2. Dampak terhadap pemanfaatan berlebihan sumber daya air 3. Dampak terhadap polusi udara dari penggunaan mesin pertanian dan perkembangan transportasi 4. Dampak	1.Penetapan kawasan pertanian dan permukiman terbatas 2.penerapan teknologi penggunaan sumberdaya air alternatif (air hujan). 3.penerapan sistem pertanian ramah lingkungan. 4.integrasi dampak perubahan iklim kedalam	1.peningkatan kesejahteraan petani sehingga petani menjadi primadona mata pencaharian masyarakat setempat 2.pengembangan pertanian organik	Integrasi pertanian ramah lingkungan serta adaptasi terhadap perubahan iklim kedalam pengembangan kawasan agropolitan Petang.

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif		Rekomendasi
			Mitigasi	Alternatif	
		hama/penyakit dari pengembangan pertanian intensif	pola tanam petani		
4	Pembangunan jalan bebas hambatan/ TOL; Kuta-Canggu-Tanah Lot. Mengwi-Batuan-Purnama	1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah 2. Dampak adanya peningkatan alih fungsi lahan. 3. Dampak terhadap gangguan sistem subak	1.Menghindari penggunaan sawah produktif besar-besaran 2.menutup/membatasi akses percabangan jalan TOL.	1.Pembangunan Jalan layang pada ruas-ruas tertentu untuk menjaga sistem subak.	Pembangunan jalan bebas hambatan/ TOL; Kuta-Canggu-Tanah Lot. Mengwi-Batuan-Purnama dengan tidak mengganggu kawasan /lahan pertanian produktif maupun kawasan lindung
5	Pengembangan Kawasan Industri	1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah 2. Dampak adanya peningkatan alih fungsi lahan. 3. Dampak terhadap gangguan sistem subak. 4. Dampak pencemaran lingkungan 5. Dampak sosial-kemasyarakatan	1. Menghindari penggunaan sawah produktif besar-besaran 2.Penetapan sawah abadi dengan sistem subaknya. 3.Penetapan industri jenis tertentu dengan kajian kelayakan lingkungan 4.Penerapan industri dengan sistem pengolahan limbah/sampah dan penerapan baku mutu lingkungan	1.penetapan kawasan industri khusus	Penetapan kawasan industri khusus dengan kajian daya tampung dan daya dukung serta luas yang dibatasi berdasarkan kepentingan lingkungan dan kehidupan social-masyarakat setempat

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif		Rekomendasi
			Mitigasi	Alternatif	
			secara ketat.		
6	Pengembangan Kawasan Perikanan	1. Dampak terhadap pencemaran pantai. 2. Dampak/gangguan terhadap daerah wisata sekitarnya 3. Dampak kepadatan lalu lintas di kawasan dan sekitarnya .	1.Pembangunan infrastruktur sanitasi/kebersihan yang memadai. 2.mendorong masyarakat menjaga kebersihan kawasan 3.pembangunan infrastruktur ; jalan dan areal parkir yang memadai 4.Memberi jarak/radius kawasan daerah wisata terdekat	1.Pembangunan kawasan perikanan khusus	Pengembangan kawasan perikanan terbatas dengan fasilitas pendukung termasuk pengolahan limbah dan sampah serta pengendalian kerusakan lingkungan pesisir.

REKOMENDASI

1. Pengembangan infrastruktur Kuta sebagai bagian dari Kawasan Perkotaan Sarbagita mempertimbangkan ruang, mutu kelayakan, kapasitas dan budaya.
2. Pengembangan konsep kota taman yang mengintegrasikan sistem sawah dan DAS serta menjaga nilai social kemasysarakatan yang telah tumbuh.
3. Integrasi pertanian ramah lingkungan serta adaptasi terhadap perubahan iklim kedalam pengembangan kawasan agropolitan Petang.
4. Pembangunan jalan bebas hambatan/ TOL; Kuta- Tanah Lot-Soka serta Mengwi-Batuan- Purnama dengan tidak mengganggu kawasan /lahan pertanian produktif maupun kawasan lindung
5. Penetapan kawasan industri khusus dengan kajian daya tampung dan daya dukung serta luas yang dibatasi berdasarkan kepentingan lingkungan dan kehidupan sosial-masyarakat setempat
6. Pengembangan kawasan perikanan terbatas dengan fasilitas pendukung termasuk pengolahan limbah dan sampah serta pengendalian kerusakan lingkungan pesisir.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung yaitu:

1. Masih rendahnya minat baca masyarakat Kabupaten Badung dapat dilihat dari kunjungan masyarakat ke Perpustakaan yang masih rendah.
2. Kondisi perpustakaan sekolah dan Desa/Kelurahan yang belum memenuhi standar
3. Penerapan pengelolaan arsip yang belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Perpustakaan dan kearsipan merupakan salah satu pusat sumber informasi yang mencakup berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni maupun budaya. Pengelolaan perpustakaan dan penataan kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan menjadi sebuah kewajiban dalam upaya untuk menyediakan informasi kepada masyarakat. Maka sebagai upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat dan pelayanan penataan kearsipan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kearsipan dan perpustakaan
- b. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
- c. Kerjasama antar instansi dalam upaya penataan arsip dan perpustakaan
- d. Meningkatkan keanekaragaman koleksi perpustakaan
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya tenaga pengelola perpustakaan dan kearsipan

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BADUNG

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada visi dan misi Bupati serta didasarkan pada isu-isu strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Adapun tujuan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah :

**Mewujudkan Kualitas pelayanan Kearsipan dan Perpustakaan Menuju Badung
Tertib Arsip Dan Budaya Gemar Membaca**

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka ditetapkan sasaran yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu tahunan. Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan antara lain :

- a. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kearsipan dan perpustakaan
- b. Terwujudnya tata kelola kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan
- c. Meningkatnya budaya gemar membaca

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung tertuang dalam tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
					2017	2018	2019	2020	2021
1	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Kearsipan dan Perpustakaan Menuju Badung Tertib Arsip Dan Budaya Gemar Membaca	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kearsipan dan perpustakaan	1	Persentase kunjungan ke perpustakaan	1.9	1.9	2.37	2.97	3.71
			2	Persentase penggunaan TI dalam pengelolaan kearsipan	0.00	10.00	20.00	30.00	40.00
			3	Persentase penggunaan TI dalam pengelolaan perpustakaan	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00
		Terwujudnya tata kelola kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan	1	Persentase Perangkat Daerah dan Desa Yang Kearsipannya Sesuai Aturan Yang Berlaku	10%	10%	10%	10%	10%
			2	Jumlah peserta bimtek kearsipan	129 org	139 org	139 org	139 org	139 org
			3	Jumlah peserta bimtek pengawasan kearsipan	-	40 org	40 org	40 org	40 org
		Meningkatnya budaya gemar membaca	1	Jumlah kunjungan perpustakaan keliling	60 kali	76 kali	76 kali	76 kali	76 kali
			2	Persentase perpustakaan yang memenuhi standar Perpustakaan Nasional RI	20%	30%	40%	50%	60%
			3	Jumlah peserta bimtek perpustakaan	60 org	122 org	122 org	122 org	122 org

4.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk Mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas, strategi dan kebijakan yang ditempuh Dinas kearsipan dan Perpustakaan antara lain :

- a. Strategi : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
Kebijakan : Mempermudah proses pelayanan
- b. Strategi : Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi kearsipan
Kebijakan : Penggunaan teknologi informasi kearsipan
- c. Strategi : Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi perpustakaan
Kebijakan : Penggunaan teknologi informasi perpustakaan
- d. Strategi : Peningkatan pengelolaan kearsipan Perangkat Daerah dan Desa
Kebijakan : Melaksanakan pembinaan kearsipan
- e. Strategi : Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengelola kearsipan
Kebijakan : Menyelenggarakan bimtek kearsipan
- f. Strategi : Peningkatan pengetahuan pengawasan kearsipan
Kebijakan : Menyelenggarakan bimtek pengawasan kearsipan
- g. Strategi : Peningkatan koleksi perpustakaan
Kebijakan : Pengadaan koleksi perpustakaan
- h. Strategi : Peningkatan kondisi perpustakaan agar memenuhi standar Perpustakaan Nasional RI
Kebijakan : Pembinaan, monitoring dan pendataan perpustakaan
- i. Strategi : Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengelola perpustakaan
Kebijakan : Menyelenggarakan bimtek perpustakaan

Secara terperinci, strategi dan arah kebijakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung termuat dalam table 4.2 dibawah ini :

Tabel 4.2
Strategi dan Arah Kebijakan

SASARAN				CARA MENCAPAI TUJUAN SASARAN						KETERANGAN
URAIAN		INDIKATOR		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM		
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kearsipan dan perpustakaan	1	Persentase kunjungan ke perpustakaan	1.	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	1.	Mempermudah proses pelayanan	1	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	
								2	Peningkatan Kualitas pelayanan informasi	
		2	Persentase penggunaan TI dalam pengelolaan kearsipan	2	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi kearsipan	2	Penggunaan teknologi informasi kearsipan	2	Perbaikan sistem administrasi kearsipan	
			3	Persentase penggunaan TI dalam pengelolaan perpustakaan	3	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi perpustakaan	3	Penggunaan teknologi informasi perpustakaan	3	Peningkatan Kualitas pelayanan informasi
2	Terwujudnya tata kelola kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan	1	Persentase PD dan Desa yang kearsipannya sesuai aturan yang berlaku	1	Peningkatan pengelolaan kearsipan PD dan Desa	1	Melaksanakan pembinaan kearsipan	1	Perbaikan sistem administrasi kearsipan	
		2	Jumlah tenaga kearsipan yang mempunyai kemampuan mengelola arsip dengan baik	2	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengelola kearsipan	2	Menyelenggarakan bimtek kearsipan	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
		3	Jumlah tenaga pengawas kearsipan yang mempunyai kemampuan pengelolaan arsip yang baik	3	Peningkatan pengetahuan pengawasan kearsipan	3	Menyelenggarakan bimtek pengawasan kearsipan	3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
3	Meningkatnya budaya gemar membaca	1	Jumlah kunjungan perpustakaan keliling	1	Peningkatan minat baca masyarakat	1	Menyelenggarakan kegiatan perpustakaan keliling	1	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	
		2	Persentase perpustakaan yang memenuhi standar Perpustakaan Nasional RI	1	Peningkatan kondisi perpustakaan agar memenuhi standar Perpustakaan Nasional RI	1	Pembinaan, monitoring dan pendataan perpustakaan	1	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	
		3	Jumlah tenaga pengelola mempunyai kemampuan mengelola perpustakaan dengan baik	1.	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengelola perpustakaan	1.	Menyelenggarakan bimtek perpustakaan	1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagaimana sebelumnya telah diuraikan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung, maka untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan. Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.1 , Tabel 5.2 dan 5.3 dibawah ini :

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra SKPD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan									
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			3	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				5,812,204,135.00		8,624,499,630.00		12,202,858,995.00		13,423,144,894.50		14,967,001,194.95
			01	FUNGSI PERENCANAAN				5812204135.00		8,624,499,630.00		12,202,858,995.00		13,423,144,894.50		14,967,001,194.95
1. Mewujudkan Kualitas Pelayanan Kearsipan dan Perpustakaan Menuju Badung Tertib Arsip Dan Budaya Gemar	1 Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kearsipan dan	1 Persentase jumlah kunjungan ke perpustakaan	19	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan		11000 orang	1,610.33	11000 orang	1,555.38	13750 orang	1,291.46	17188 orang	1,420.61	21485 orang	1,562.67
			01	Layanan Pustaka dan Informasi	Jumlah kunjungan ke perpustakaan		11000 orang	201.33	11000 orang	519.45	13750 orang	426.43	17188 orang	469.07	21485 orang	515.98
			02	Pemeliharaan koleksi buku perpustakaan	Jumlah koleksi buku yang terpelihara		34000 eksemplar	32.42	34000 eksemplar	72.37	38150 eksemplar	80.71	42450 eksemplar	88.78	46950 eksemplar	97.66
			08	Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan di Kabupaten Badung	Jumlah pengadaan buku-buku perpustakaan		4000 examplar	220.00	4150 eksemplar	229.21	4300 eksemplar	345.81	4500 eksemplar	380.40	4700 eksemplar	418.44
				Pameran Perpusnas Jakarta EXPO	Jumlah pelaksanaan pameran dalam rangka mengikuti pameran perpusnas Jakarta Expo		1 kali	147.75	1 kali	185.64	1 kali	172.85	1 kali	190.14	1 kali	209.15
			17	Gerakan wisata arsip dan perpustakaan untuk para lansia dan anak-anak sekolah di lingkungan perpustakaan	Jumlah Pengunjung arsip dan perpustakaan		2760 orang	1,008.82	7680 orang	433.55	-	-	-	-	-	-
				Pemkab Badung												
				Stock opname koleksi buku perpustakaan	Jumlah buku yang di stock opname		-	-	34000 eksemplar	14.81	-	-	-	-	-	-
				Sosialisasi pengembangan minat baca	Jumlah peserta sosialisasi pengembangan minat baca		-	-	346 orang	76.27	346 orang	59.95	346 orang	65.95	346 orang	72.54
				Penataan ruang layanan perpustakaan	Jumlah ruangan yang ditata		-	-	1 ruangan	24.09	1 ruangan	205.70	1 ruangan	226.27	1 ruangan	248.90
			16	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah Dokumen/Arsip yang diselamatkan dan dilestarikan		64 dokumen	604,260,400	74 dokumen	891,134,760	74 dokumen	949,569,920	74 dokumen	1,044,526,912	74 dokumen	1,148,979,603
				Pengakuisisian arsip in aktif SKPD	Jumlah arsip in aktif yang diakuisisi		800 box	365.90	825 box	690.53	825 box	680.34	825 box	748.37	825 box	823.21
				Penilaian arsip dalam rangka penyusutan arsip in aktif dan arsip yang dibukukan	Jumlah arsip yang dinilai		300 box	73.78	325 box	81.07	325 box	82.04	325 box	90.24	325 box	99.27
				Pendataan/penelusuran arsip statis sebagai warisan budaya	cakupan arsip statis yang didata		2 paket	95.49	74 dokumen	42.58	74 dokumen	110.24	74 dokumen	121.26	74 dokumen	133.39
				Perawatan dan pelayanan arsip SKPD	Jumlah SKPD yang mendapatkan perawatan dan pelayanan arsip		53 SKPD	69.10	35 PD	76.96	35 PD	76.96	35 PD	84.66	35 PD	93.12
		Persentase penggunaan TI dalam pengelolaan kearsipan	18	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase perangkat daerah dan sekolah yang menggunakan aplikasi TI		100%	630,918,475	100%	673,163,700	100%	1,104,516,200	100%	1,214,967,820	100%	1,336,464,602
			13	Pemilihan penataan dan alih media arsip SKPD	Cakupan arsip SKPD yang mendapatkan pemilahan penataan dan alih media		1 paket	583.65	-	-	-	-	-	-	-	-
				Pengelolaan Arsip In Aktif Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip in aktif		-	-	3 PD	459.97	3 PD	576.27	3 PD	633.90	3 PD	697.29
			14	Updating materi diorama	Jumlah materi diorama yang diupdate		5 materi	47.27	5 materi	213.19	5 materi	180.48	5 materi	198.53	5 materi	218.38
			15	Wisata arsip anak sekolah dan lansia	Jumlah pelaksanaan kegiatan wisata arsip		-	-	-	-	45 kali	347.77	90 kali	382.55	90 kali	420.80
				Pameran Arsip dalam rangka HUT Mangupura di Kabupaten Badung	Jumlah pelaksanaan pameran arsip		-	-	-	-	6 kecamatan	100.42	6 kecamatan	110.46	6 kecamatan	524.59
			17	Layanan arsip di Kabupaten Badung	Jumlah pelaksanaan pelayanan arsip		-	-	-	-	60 kali	70.89	60 kali	77.98	60 kali	85.77
		Persentase penggunaan TI dalam pengelolaan perpustakaan	19	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan		11000 orang	132,539,800	11000 orang	201,145,200	13750 orang	225,506,160	17188 orang	248,056,776		

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2017 - 2021
Diskerpus Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra SKPD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan									
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan	kearsipannya sesuai aturan yang berlaku			Pembinaan Penyusutan Arsip In Aktif pada SKPD	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti pembinaan penyusutan arsip in aktif	18 PD dan 12 Desa/Kelurahan	22.31	-	-	-	-	-	-	-	-
					Pembinaan Arsip Dinamis Aktif di Lingkungan Pemerintah Kab. Badung	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti pembinaan arsip dinamis aktif	18 PD dan 12 Desa/Kelurahan	26.73	-	-	-	-	-	-	-	-
					Pembinaan Pemetaan Arsip In Aktif di Lingkungan Pemerintah Kab. Badung	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti pembinaan pemetaan arsip in aktif	18 PD dan 12 Desa/Kelurahan	12.74	-	-	-	-	-	-	-	-
					Penataan Arsip Pada Desa Lomba Tingkat Provinsi	Jumlah desa yang mendapatkan penataan arsip pada desa lomba tingkat propinsi	2 Desa/Kelurahan	25.92	-	-	-	-	-	-	-	-
					Pembinaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah perangkat daerah dan desa yang mengikuti pembinaan kearsipan	-	-	97 unit kerja	97.68	97 unit kerja	97.68	97 unit kerja	107.45	97 unit kerja	118.20
					Penataan arsip pada desa untuk mendukung lomba desa terpadu	Jumlah desa peserta lomba desa terpadu	-	-	5 desa	20.84	5 desa	20.84	5 desa	22.92	5 desa	25.21
					Penyusunan peraturan Bupati tentang pedoman penyusutan arsip pemerintah kabupaten badung	Jumlah Perbup yang tersusun	-	-	1 peraturan	88.36	1 peraturan	88.36	1 peraturan	97.19	1 peraturan	117.60
					Penyusunan peraturan tentang pedoman pembuatan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis	Jumlah peraturan yang tersusun	-	-	1 peraturan	157.65	1 peraturan	157.65	1 peraturan	173.42	1 peraturan	209.84
					Monitoring dan evaluasi kearsipan di Kabupaten Badung	Jumlah perangkat daerah dan desa yang mengikuti monev	53 SKPD,46 Desa, 30 TU sekolah	93,337,700	30 Perangkat Daerah	11.58	-	-	-	-	-	-
					Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan internal kearsipan di Kabupaten Badung	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi	-	-	-	35 Perangkat Daerah	173.34	35 Perangkat Daerah	173.34	190.67	-	209.74
					Audit kearsipan internal di Kabupaten Badung	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti audit	-	-	10 desa	213.62	10 desa	213.62	10 desa	234.98	10 desa	258.48
					Penyusunan produk-produk hukum tentang kearsipan dan perpustakaan	Jumlah produk hukum yang disusun	-	-	3 peraturan	270.00	4 peraturan	476.09	4 peraturan	523.70	4 peraturan	576.07
					Sosialisasi produk-produk hukum tentang kearsipan dan perpustakaan	Jumlah perangkat daerah dan desa yang mengikuti sosialisasi	-	-	38 PD, 62 Desa	139.29	38 PD, 62 Desa	93.04	38 PD, 62 Desa	102.34	38 PD, 62 Desa	112.57
					Akreditasi Kearsipan	Jumlah perangkat daerah yang terakreditasi	-	-	-	1 PD	422.06	1 PD	422.06	1 PD	464.26	1 PD
					Penilaian pengelolaan arsip antar perangkat daerah di Kabupaten Badung	Jumlah pengelola arsip perangkat daerah yang mengikuti lomba kearsipan	-	-	-	34 Perangkat Daerah	142.67	34 Perangkat Daerah	142.67	156.94	34 Perangkat Daerah	172.64
	Jumlah tenaga kearsipan yang mempunyai kemampuan mengelola		5		Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Jumlah sumber daya aparatur yang meningkat kualitasnya	35 PD dan 62 Desa	277,269,900	35 PD dan 62 Desa	797,906,940	35 PD dan 62 Desa	2,434,861,600	35 PD dan 62 Desa	2,678,347,760	35 PD dan 62 Desa	2,946,182,536
					Bimtek Kearsipan Bagi tenaga Pengelola Arsip di Lingkungan Pemerintah Kab. Badung	Jumlah peserta bimtek kearsipan	53 SKPD,46 Desa, 30 TU sekolah	93.34	129 orang	153.24	139 orang	877.74	139 orang	965.51	139 orang	1,062.06
	arsip dengan baik				Bimbingan Teknis Tata Cara Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Pemerintah Kab. Badung	Jumlah peserta bimtek JRA	40 orang	68.95	40 orang	75.85	-	-	-	-	-	-
					Bimbingan Teknis Penyusunan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Jumlah peserta bimtek Penyusunan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip	-	-	-	-	40 orang	87.66	40 orang	96.42	40 orang	106.07
	Jumlah tenaga pengawas kearsipan yang mempunyai kemampuan pengelolaan arsip yang baik		5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang meningkat kualitasnya	189 Orang	-	301 orang	81,245,300	301 orang	451,860,900	301 orang	497,046,990	301 orang	546,751,689
					Bimtek Pengawasan Kearsipan di Kab. Badung	Jumlah peserta bimtek pengawas kearsipan	-	-	40 orang	81.25	40 orang	451.86	40 orang	497.05	40 orang	546.75
	Meningkatnya budaya gemar membaca	Jumlah kunjungan perpustakaan keiling	19		Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah kunjungan perpustakaan keiling	60 kali	87,111,700	76 kali	377,154,200	76 kali	550,280,900	76 kali	605,308,990	76 kali	665,839,889
					Silang Layanan Bahan Pustaka	Jumlah perpustakaan sekolah yang mendapatkan pelayanan silang layanan bahan pustaka	30 perpustakaan	27.87	30 perpustakaan	29.17	30 perpustakaan	15.46	30 perpustakaan	17.01	30 perpustakaan	18.71
					Pelayanan Perpustakaan Keliling	Jumlah pelaksanaan perpustakaan keiling	60 kali	35.35	76 kali	36.19	76 kali	121.25	76 kali	133.38	76 kali	146.72
					Pembinaan pengembangan minat baca	Jumlah peserta pembinaan pengembangan minat baca	6 orang	23.89	-	-	-	-	-	-	-	-
					Lomba Minat Baca	Jumlah peserta lomba minat baca	-	-	6 orang	156.92	6 orang	156.92	6 orang	172.61	6 orang	189.88
					Gebyar Badung Membaca	Jumlah peserta gebyar badung membaca	-	-	2000 orang	154.87	2000 orang	256.64	2000 orang	282.31	2000 orang	310.54
					Penekrusan, Penghimpunan, Pengelolaan naskah kuno dan koleksi daerah non lontar	Jumlah naskah kuno dan koleksi daerah non lontar yang ditelusuri	-	-	-	2 naskah	24.19	2 naskah	26.61	2 naskah	29.27	
	Persentase perpustakaan yang memenuhi standar perpustakaan		19		Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	11000 orang	44,824,100	11000 orang	291,181,100	13750 orang	274,975,700	17188 orang	302,473,270	21485 orang	332,720,597
					Pembinaan dan evaluasi perpustakaan di Kabupaten Badung	Jumlah perpustakaan yang dibina dan dievaluasi di Kab. Badung	76 perpustakaan	44,824,100	-	-	-	-	-	-	-	-
					Pengembangan Input Data Nomor Pokok Perpustakaan NPP	Jumlah perpustakaan sekolah yang memiliki NPP	-	-	70 perpustakaan sekolah	26.35	70 perpustakaan sekolah	26.35	70 perpustakaan sekolah	28.98	70 perpustakaan sekolah	31.88
					Pembinaan dan penilaian lomba perpustakaan desa dan sekolah dalam rangka lomba tingkat provinsi	Jumlah perpustakaan desa dan sekolah yang dibina	-	-	3 perpustakaan	17.81	2 perpustakaan	20.17	2 perpustakaan	22.19	2 perpustakaan	24.41
					Monitoring dan evaluasi perpustakaan desa dan sekolah di Kabupaten Badung	Jumlah perpustakaan desa dan sekolah yang dimonitoring dan dievaluasi	-	-	107 perpustakaan	48.81	69perpustakaan	82.37	69perpustakaan	90.60	69perpustakaan	99.66
					Pembinaan perpustakaan desa dan sekolah di Kabupaten Badung	Jumlah perpustakaan desa dan sekolah yang dibina	-	-	138 perpustakaan	48.21	69perpustakaan	80.40	69perpustakaan	88.44	69perpustakaan	97.28
					Penilaian pengelolaan perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dinilai	-	-	30 perpustakaan	150.00	30 perpustakaan	65.69	30 perpustakaan	72.26	30 perpustakaan	79.48
	Jumlah tenaga pengelola perpustakaan yang mempunyai kemampuan mengelola perpustakaan dengan baik meningkat		5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang meningkat kualitasnya	189 Orang	42,275,000	301 orang	48,208,400	301 orang	142,614,800	301 orang	156,876,280	301 orang	172,563,908
			10		Bimbingan teknis tenaga pengelola perpustakaan di kabupaten Badung	Jumlah peserta bimtek tenaga pengelola perpustakaan	60 orang	42.28	60 orang	48.21	122 orang	142.61	122 orang	156.88	122 orang	172.56

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator Tahun 2017 - 2021
Diskerpus Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra SKPD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan									
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Meningkatnya dukungan manajemen yang akuntabel dan profesional	Persentase realisasi keuangan	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran		100%	439,095,000	100%	317,611,940	100%	249,345,125	100%	274,279,638	100%	301,707,601
			18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		1 ls	250.00	1 ls	250.00	1 ls	150.00	1 ls	165.00	1 ls	181.50
			23	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah pegawai tidak tetap		3 orang THL	189.10	1 orang THL	67.61	3 orang THL	99.35	3 orang THL	109.28	3 orang THL	120.21
			2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APABATUR	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur		100%	863,463,960	100%	1,851,296,450	100%	2,612,452,800	100%	2,873,698,080	100%	3,161,067,888
			1	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor		1 paket	290.00	1 paket	1,550.00	1 paket	20.80	1 paket	22.88	1 paket	25.17
			2	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor		1 unit	207.97	-	92.68	1 paket	60.95	1 paket	67.05	1 paket	73.75
			8	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional		1 Unit Mobil dan 2 Unit Sepeda Motor	15.00	2 Unit Mobil dan 1 Unit Sepeda Motor	15.00	1 unit mobil, 2 bus, 1 unit sepeda motor	2,270.00	2 mobil, 5 sepeda motor	2,497.00	2 mobil, 5 sepeda motor	2,746.70
			9	Pembuatan tempat parkir	Jumlah tempat parkir yang dibuat		1 unit	92.47	-	-	-	-	-	-	-	.00
			22	Pemeliharaan gedung kantor	Cakupan pemeliharaan gedung kantor		2 paket	74.60	3 unit	6.00	3 unit	15.00	3 unit	16.50	3 unit	18.15
			24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin		11 unit mobil dan 18 sepeda motor	54.41	9 mobil, 10 sepeda motor	45.70	9 mobil, 10 sepeda motor	190.00	9 mobil, 10 sepeda motor	209.00	9 mobil, 10 sepeda motor	229.90
			26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Cakupan perlengkapan kantor yang dipelihara		2 paket	74.60	1 paket	82.06	1 paket	10.00	1 paket	11.00	1 paket	12.10
			28	Pemeliharaan peralatan kantor	Cakupan peralatan kantor yang dipelihara		1 paket	54.41	1 paket	59.85	1 paket	45.70	1 paket	50.27	1 paket	55.30
			6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	251,100,000	100%	285,540,000	100%	350,040,000	100%	385,044,000	100%	423,548,400
			1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Cakupan laporan capaian kinerja		12 bulan	251.10	12 bulan	285.54	12 bulan	350.04	12 bulan	385.04	12 bulan	423.55
		Nilai AKIP perangkat daerah	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	5,999,900	100%	6,000,000	100%	6,000,000	100%	6,600,000	100%	7,260,000
			6	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah laporan AKIP yang disusun		4 dokumen	6.00	4 dokumen	6.00	4 dokumen	6.00	4 dokumen	6.60	4 dokumen	7.26
			9	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun		3 dokumen	9,999,400	3 dokumen	10,000,000	3 dokumen	10,000,000	3 dokumen	11,000,000	3 dokumen	12,100,000
			1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja, Renstra, RKA)	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun		3 dokumen	9,999,400	3 dokumen	10,000,000	3 dokumen	10,000,000	3 dokumen	11,000,000	3 dokumen	12,100,000
		Persentase kehadiran pegawai	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran		100%	207,947,000	100%	208,537,000	100%	221,102,000	100%	243,212,200	100%	267,533,420
			1	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Jumlah sarana pelayanan administrasi keuangan yang tersedia		500 material 3000, 760 lbr material 6000, 5 buku cek	6.06	500 material 3000, 760 lbr material 6000, 10 buku cek	6.65	500 material 3000, 760 lbr material 6000, 10 buku cek	6.66	500 material 3000, 760 lbr material 6000, 10 buku cek	7.33	500 material 3000, 760 lbr material 6000, 10 buku cek	8.06
			2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia		10 buah telepon	96.00	10 buah telepon	100.00	10 buah telepon	100.00	10 buah telepon	110.00	10 buah telepon	121.00
			8	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga pengelola kebersihan kantor		12 orang	495.14	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor		1 paket	30.00	1 paket	35.00	1 paket	35.00	1 paket	38.50	1 paket	42.35
			11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Kebutuhan alat alat tulis kantor yang tersedia		1 paket	45.00	1 paket	30.00	1 paket	30.00	1 paket	33.00	1 paket	36.30
			12	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik yang tersedia		1 paket	9.00	1 paket	10.00	1 paket	10.00	1 paket	11.00	1 paket	12.10
			14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga yang tersedia		1 paket	9.33	1 paket	9.33	1 paket	21.89	1 paket	24.08	1 paket	26.49
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		1200 eksemplar	86.16	1224 eksemplar	85.84	1224 eksemplar	85.84	1224 eksemplar	94.42	1224 eksemplar	103.86
			17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu dan pegawai		12 bulan	28.46	12 bulan	38.38	12 bulan	38.38	12 bulan	42.21	12 bulan	46.43
			20	Penyediaan dekorasi	Jumlah dekorasi dalam rangka peringatan hari hari besar nasional		1 paket	10.00	4 jenis	20.00	4 jenis	32.00	4 jenis	35.20	4 jenis	38.72
			21	Penyediaan bahan bakar kendaraan dinas/operasional	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional		22081 liter	242.89	24375 liter	268.13	24375 liter	273.90	24375 liter	301.29	24375 liter	331.42
			22	Penyediaan upacara keagamaan	Jumlah sarana upacara keagamaan		12 jenis	41.05	13 jenis	48.99	13 jenis	49.28	13 jenis	54.21	13 jenis	59.63
			24	Lomba-lomba olahraga/kesenian dalam rangka HUT Mangupura	Cakupan lomba olahraga/kesenian		1 paket	15.00	1 paket	25.00	1 paket	50.00	1 paket	55.00	1 paket	60.50
			26	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		8 mobil, 8 spd motor	12.40	9 mobil, 10 spd motor	12.00	9 mobil, 10 sepeda motor	15.50	9 mobil, 10 sepeda motor	17.05	9 mobil, 10 sepeda motor	18.76
			27	Pelaksanaan upacara penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat	Cakupan upacara penganyaran		1 paket	40.00	1 paket	148.00	1 paket	148.00	1 paket	162.80	1 paket	179.08
			28	Penyediaan jasa publikasi pengumuman lelang melalui media cetak	Cakupan publikasi pengumuman lelang melalui media cetak		3 paket	4.50	-	-	-	-	-	-	-	-

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
Target	Rp. Juta		
18	19	20	21
	#VALUE!	diskerpus	Kabupaten Badung
	#VALUE!	diskerpus	Kabupaten Badung
74424000 orang	7,440,445,240	diskerpus	Kabupaten Badung
74424000 orang	2,132.25	diskerpus	Kabupaten Badung
46950 eksemplar	371.95	diskerpus	Kabupaten Badung
46950 eksemplar	1,593.86	diskerpus	Kabupaten Badung
4 kali	905.54	diskerpus	Kabupaten Badung
33480 orang	1,442.37	diskerpus	Kabupaten Badung
	.00	diskerpus	Kabupaten Badung
	.00	diskerpus	Kabupaten Badung
136000 eksemplar	14.81	diskerpus	Kabupaten Badung
1384 orang	274.71	diskerpus	Kabupaten Badung
1 ruangan	704.97		
74 dokumen	1,330,130,651	diskerpus	Kabupaten Badung
		diskerpus	Kabupaten Badung
4100 box	3,308.34	diskerpus	Kabupaten Badung
1600 box	426.39	diskerpus	Kabupaten Badung
360 dokumen	502.94	diskerpus	Kabupaten Badung
35 PD	400.80	diskerpus	Kabupaten Badung
	4,376,380,797	diskerpus	Kabupaten Badung
1 paket	583.65	diskerpus	Kabupaten Badung
12 PD	2,367.42	diskerpus	Kabupaten Badung
25 materi	857.84	diskerpus	Kabupaten Badung
	1,151.11	diskerpus	Kabupaten Badung
74424000 orang	1,044,321,677	diskerpus	Kabupaten Badung
27650 eksemplar	882.11	diskerpus	Kabupaten Badung
1600 cover	13.44		
76 sekolah	148.77	diskerpus	Kabupaten Badung
35 PD dan 62 Desa	5,583,686,188	diskerpus	Kabupaten Badung

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
Target	Rp. Juta		
18	19	20	21
18 PD dan 12 Desa/Kelurahan	22.31		
18 PD dan 12 Desa/Kelurahan	26.73	diskerpus	Kabupaten Badung
18 PD dan 12 Desa/Kelurahan	12.74	diskerpus	Kabupaten Badung
2 Desa/Kelurahan	25.92	diskerpus	Kabupaten Badung
35 PD dan 62 Desa	421.01	diskerpus	Kabupaten Badung
20 desa	89.81	diskerpus	Kabupaten Badung
8 petpup	410.07	diskerpus	Kabupaten Badung
4 peraturan	731.67	diskerpus	Kabupaten Badung
30 PD	104.92	diskerpus	Kabupaten Badung
35 Perangkat Daerah	573.75	diskerpus	Kabupaten Badung
35 PD	920.69	diskerpus	Kabupaten Badung
15 peraturan	1,845.87	diskerpus	Kabupaten Badung
38 PD, 62 Desa	447.24	diskerpus	Kabupaten Badung
1 PD	1,397.00	diskerpus	Kabupaten Badung
34 Perangkat Daerah	472.25	diskerpus	Kabupaten Badung
35 PD dan 62 Desa	3,296,696,123	diskerpus	Kabupaten Badung
685 orang	3,151.89	diskerpus	
200 orang	144.80	diskerpus	
120 orang	290.15	diskerpus	
1393 orang	1,576,904,879	diskerpus	
160 orang	1,576.90	diskerpus	Kabupaten Badung
364 kali	2,285,695,679	diskerpus	
150 perpustakaan	108.22	diskerpus	Kabupaten
364 kali	472.89	diskerpus	Badung
6 orang	23.89	diskerpus	
6 orang	676.33	diskerpus	Kabupaten
8000 orang	1,004.36	diskerpus	Badung
74424000 orang	#VALUE!	diskerpus	
	#VALUE!		Kabupaten
280 perpustakaan	113.57		Badung
12 perpustakaan	84.59	diskerpus	
314 perpustakaan	321.44	diskerpus	
345 perpustakaan	314.33	diskerpus	Kabupaten
90 perpustakaan	367.43	diskerpus	Badung
	562,538,388.000	diskerpus	Kabupaten
300 orang	562.54	diskerpus	Badung

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungja wah.	Lokasi
Target	Rp. Juta		
18	19	20	21
	1,582,039,304	diskerpus	
1 Ls	996.50	diskerpus	
13 orang THL	585.54	diskerpus	
100%	11,361,979,178	diskerpus	Kabupaten
1 paket	1,908.85	diskerpus	
1 unit	502.41	diskerpus	
4 unit mobil dan 10 sepeda motor.	7,543.70	diskerpus	Kabupaten
1 unit	92.47	diskerpus	Badung
1 paket	130.25	diskerpus	
12 unit mobil dan 18 sepeda motor	729.01	diskerpus	
2 paket	189.76	diskerpus	Kabupaten
1 paket	265.53	diskerpus	Badung
100%	1,695.27		
12 bulan	1,695.27		
100%	31.86	diskerpus	Kabupaten Badung
4 dokumen	31.86	diskerpus	Kabupaten Badung
3 dokumen	53.10	diskerpus	Kabupaten Badung
3 dokumen	53.10	diskerpus	Kabupaten Badung
100%	4,975.52	diskerpus	Kabupaten Badung
2500 lbr material 3000,	34.77	diskerpus	Kabupaten Badung
10 buah telepon	527.00	diskerpus	Kabupaten Badung
12 orang	495.14	diskerpus	Kabupaten Badung
1 paket	180.85	diskerpus	Kabupaten Badung
1 paket	174.30	diskerpus	Kabupaten Badung
1 paket	52.10	diskerpus	Kabupaten Badung
1 paket	91.11	diskerpus	Kabupaten Badung
6096 eksemplar	456.11	diskerpus	Kabupaten Badung
12 bulan	193.86	diskerpus	Kabupaten Badung
4 jenis	135.92	diskerpus	Kabupaten Badung
119581 liter	1,417.63	diskerpus	Kabupaten Badung
13 jenis	253.16	diskerpus	Kabupaten Badung
1 paket	205.50	diskerpus	Kabupaten Badung
12 mobil 18 sepeda motor	75.71	diskerpus	Kabupaten Badung
1 paket	677.88	diskerpus	Kabupaten Badung
3 paket	4.50	diskerpus	Kabupaten Badung

Tabel 5.2
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Tahun 2016
Diskerpus Kabupaten Badung

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Kode		Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas		Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)		Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan	
												Target	Rp. Juta
1		2		3		4		5		6		7	8
						1		URUSAN WAJIB					
								Kantor Perpustakaan Daerah					1,888.732
								Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD		12 bulan	527.513
								Kegiatan :					
								02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya biaya jasa komunikasi kantor		5 Buah Telepon	96.000
								03	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya kelengkapan administrasi berupa materai dan benda pos		350 Lembar Materai 6000, 150 Lembar Materai 3000, 10 Buku Cek	3.000
								06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya biaya administrasi kendaraan dinas/operasional		5 unit mobil dan 9 unit sepeda motor	7.700
								10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianyakelengkapan atau kebutuhan alat-alat tulis kantor		1 Paket	25.000
								11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kelengkapan atau kebutuhan alat-alat tulis kantor		1 paket	20.000
								12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik		1 Paket	5.000
								14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga		1 paket	2.898
								15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan yang memadai		234 Eksemplar	20.242
								17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya biaya untuk kebutuhan makanan dan minuman pegawai/tamu		1 Paket	13.200
								18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi antar Pemerintah Daerah dengan unsur Pemerintah lainnya		1 Ls	55.000
								20	Penyediaan dekorasi	Tersedianya dekorasi kantor dalam rangka peringatan hari-hari besar nasional		1 Paket	5.000
								21	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Tersedianya bahan bakar kendaraan dinas/operasional kantor		7860 Liter	86.460
								22	Penyediaan upacara keagamaan	Tersedianya sarana/prasarana upacara keagamaan		1 Paket	32.110

							23	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Tersedianya jasa pegawai tidak tetap	2 orang	109.403
							24	Kegiatan Lomba Olah Raga / Kesenian Pada Hari-hari Bersejarah	Terlaksananya aktivitas olah raga dan seni pada peringatan hari-hari bersejarah	1 Paket	15.000
							25	Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat	Terlaksananya kegiatan penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat	1 paket	30.000
							26	Penyediaan Jasa Publikasi Pengumuman Lelang Melalui Media Cetak	Tersedianya jasa pengumuman lelang	1 paket	1.500
							02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	12 bulan	339.828
								Kegiatan :			
							07	Pengadaan perlengkapan kantor	Tersedianya perlengkapan kantor untuk memperlancar pelaksanaan tugas	2 paket	80.549
							09	Pengadaan peralatan kantor	Tersedianya perlengkapan kantor untuk memperlancar pelaksanaan tugas	3 Paket	172.000
							22	Pemeliharaan Gedung Kantor	Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor	1 paket	5.000
							24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	5 unit mobil dan 9 unit sepeda motor	54.766
							26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan kantor	1 paket	18.500
							28	Pemeliharaan peralatan kantor	Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan kantor	1 paket	9.013
							05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya pengetahuan petugas perpustakaan Sekolah di bidang layanan pustaka	12 bulan	43.224
								Kegiatan :			
							05	Bimbingan Teknis Tenaga Perpustakaan Sekolah di Kabupaten Badung	Terlaksananya pelatihan tenaga perpustakaan di Kabupaten Badung	90 orang	43.224
							06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 bulan	69.200
								Kegiatan :			
							01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Bulan	58.200
							05	Survey Kepuasan Masyarakat	Telaksananya Survey Kepuasan Masyarakat	15 Buku	5.000
							06	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Terlaksananya penyusunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)	4 Dokumen	6.000
							19	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya jumlah kunjungan ke Perpustakaan	12 bulan	898.967
								Kegiatan :			
							01	Layanan Pustaka dan Informasi	Terlaksananya pelayanan perpustakaan terhadap masyarakat umum	1 Paket	193.374
							02	Pemeliharaan Koleksi Buku Perpustakaan	Terpeliharanya koleksi buku perpustakaan	1 Paket	26.347

							03	Penyelenggaraan Perpustakaan Keliling	Terlaksananya perpustakaan keliling di Kabupaten badung	80 kali	18.051
							04	Pengolahan Bahan Pustaka	Terlaksananya pengolahan bahan pustaka	11500 Eksemplar	162.848
							05	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perpustakaan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap perpustakaan sekolah dan Desa/Kelurahan	18 perpustakaan	14.910
							06	Silang Layanan Bahan Pustaka	Terlaksananya silang layanan koleksi buku di sekolah, Desa/Kelurahan	20 Perpustakaan	23.281
							7	Pembinaan dan Lomba Pengembangan Minat Baca Tingkat Kabupaten dan Provinsi	Terlaksananya pembinaan dan lomba pengembangan minat baca tingkat Kabupaten dan Provinsi	108 Orang	40.045
							08	Pembinaan dan Penilaian Lomba Perpustakaan SD, SMP, SMA/Kejuruan di Kabupaten Badung	Terlaksananya pembinaan dan penilaian lomba Perpustakaan SD, SMP dan SMA/Kejuruan	18 Perpustakaan	24.840
							09	Sosialisasi Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Sekolah	Terlaksananya sosialisasi perpustakaan Desa/Kelurahan dan Sekolah	300 orang	20.271
							10	Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan Daerah di Kabupaten Badung	Terlaksananya pengadaan buku-buku Perpustakaan Daerah di Kabupaten badung	5 Paket	375.000
							Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD		Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran SKPD	12 bulan	10.000
							Kegiatan :				
							01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	Terlaksananya penyusunan Dokumen RRenja, Renstra dan RKA Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Badung	3 Dokumen	10.000
							URUSAN KEARSIPAN				
							01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	619,280.00
							Kegiatan :				
							01.	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	338 lbr meterai 3.000, 320 lbr meterai 6.000 dan 5 buku cek	3,184
							02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	60.000
							10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	15 jenis	25,000
							11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah kelengkapan administrasi kantor berupa barang cetakan dan biaya penggandaan	15 jenis	20,000
							12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	3 jenis	202,983
							14.	Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	5 jenis	2,900
							15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	3.960 Explr	13,080

[illegible]

							09.	Penataan arsip pada unit kerja calon peserta lomba kearsipan tingkat Kabupaten dan Propinsi	Jumlah Desa/Kel. Yang ditata kearsipannya dalam rangka lomba	6 Desa/Kel	33,142
							12.	Lomba kearsipan antar SKPD di Lingkungan Pemkab Badung	Jumlah SKPD yang mengikut lomba kearsipan	9 SKPD	102,679
							13.	Pembinaan penyusutan arsip in aktif pada SKPD	Jumlah SKPD yang dibina dalam penyusutan arsip in aktif	30 SKPD/Desa	22,313
								Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	5 jenis arsip	432,468
							01.	Pendataan/Penelusuran arsip statis sebagai warisan Budaya	Jumlah pendataan/penelusuran arsip statis dan arsip in aktif sebagai warisan budaya	5 jenis arsip	37,361
							02.	Penilaian arsip dalam rangka penyusutan arsip in aktif dan arsip yang di bukukan	Jumlah box arsip in aktif yang dinilai dalam rangka penyusutan arsip	300 box	59,427
							03.	Pengkuisisian Arsip in aktif SKPD	Jumlah box arsip in aktif SKPD yang ditata	800 box	141,130
							04.	Pemilahan, Penataan dan Alih Media Arsip keuangan	Jumlah arsip SKPD yang ditata dan dipilah	50 meter	194,550
								Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	0.000	67,275
							06.	Perawatan dan Pelayanan Arsip SKPD	Jumlah arsip SKPD yang terawat	6.366 box	67,275
								Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Jenis Pelayanan informasi	5 materi diorama	79,183
							07.	Pembinaan arsip dinamis aktif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah SKPD dan Desa yang dibina arsip dinamis aktif	30 SKPD/Desa	67,275
							10.	Pembinaan penataan arsip in aktif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah SKPD dan Desa yang dibina arsip in aktif	30 SKPD/Desa	11,908

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra SKPD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan									
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	Target 8	Rp. Juta 9	Target 10	Rp. Juta 11	Target 12	Rp. Juta 13	Target 14	Rp. Juta 15	Target 16	Rp. Juta 17
			3	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				3,553,083,675.00		5,489,730,400.00		8,416,246,800.00		9,257,871,480.00		10,385,200,439.00
			01	FUNGSI PERENCANAAN				3553083675.00		5,489,730,400.00		8,416,246,800.00		9,257,871,480.00		10,385,200,439.00
1. Mewujudkan	1 Meningkatkan	1 Persentase jumlah kunjungan ke perpustakaan		19 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan		11000 orang	1,610.33	11000 orang	1,413.98	13750 orang	1,291.46	17188 orang	1,420.61	21485 orang	1,562.67
Kualitas Pelayanan Kearsipan dan Perpustakaan	kepuasan masyarakat terhadap															
Menuju Badung	pelayanan		01	Layanan Pustaka dan Informasi	Jumlah kunjungan ke perpustakaan		11000 orang	201.33	11000 orang	472.23	13750 orang	426.43	17188 orang	469.07	21485 orang	515.98
Tertib Arsip Dan	kearsipan		02	Pemeliharaan koleksi buku perpustakaan	Jumlah koleksi buku yang terpelihara		34000 eksemplar	32.42	34000 eksemplar	65.79	38150 eksemplar	80.71	42450 eksemplar	88.78	46950 eksemplar	97.68
Budaya Gemar	dan		08	Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan di Kabupaten Badung	Jumlah pengadaan buku-buku perpustakaan		4000 examlar	220.00	4150 eksemplar	208.37	4300 eksemplar	345.81	4500 eksemplar	380.40	4700 eksemplar	418.44
				Pameran Perpusnas Jakarta EXPO	Jumlah pelaksanaan pameran dalam rangka mengikuti pameran perpusnas Jakarta Expo		1 kali	147.75	1 kali	168.77	1 kali	172.85	1 kali	190.14	1 kali	209.15
			17	Gerakan wisata arsip dan perpustakaan untuk para lansia dan anak-anak sekolah di lingkungan Pemkab Badung	Jumlah Pengunjung arsip dan perpustakaan		2760 orang	1,008.82	7680 orang	394.14	-	-	-	-	-	-
				Stock opname koleksi buku perpustakaan	Jumlah buku yang di stock opname		-	-	34000 eksemplar	13.46	-	-	-	-	-	-
				Sosialisasi pengembangan minat baca	Jumlah peserta sosialisasi pengembangan minat baca		-	-	346 orang	69.33	346 orang	59.95	346 orang	65.95	346 orang	72.54
				Penataan ruang layanan perpustakaan	Jumlah ruangan yang ditata		-	-	1 ruangan	21.90	1 ruangan	205.70	1 ruangan	226.27	1 ruangan	248.90
			16	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah Dokumen/Arsip yang diselamatkan dan dilestarikan		64 dokumen	604,260,400	74 dokumen	891,134,760	74 dokumen	949,569,920	74 dokumen	1,044,526,912	74 dokumen	1,148,979,603
				Pengakuisisian arsip in aktif SKPD	Jumlah arsip in aktif yang diakuisisi		800 box	365.90	825 box	690.53	825 box	680.34	825 box	748.37	825 box	823.21
				Penilaian arsip dalam rangka penyusutan arsip in aktif dan arsip yang dibukukan	Jumlah arsip yang dinilai		300 box	73.78	325 box	81.07	325 box	82.04	325 box	90.24	325 box	99.27
				Pendataan/penelusuran arsip statis sebagai warisan budaya	cakupan arsip statis yang didata		2 paket	95.49	74 dokumen	42.58	74 dokumen	110.24	74 dokumen	121.26	74 dokumen	133.39
				Perawatan dan pelayanan arsip SKPD	Jumlah SKPD yang mendapatkan perawatan dan pelayanan arsip		53 SKPD	69.10	35 PD	76.96	35 PD	76.96	35 PD	84.66	35 PD	93.12
		Persentase penggunaan TI dalam pengelolaan kearsipan		18 Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase perangkat daerah dan sekolah yang menggunakan aplikasi TI		100%	630,918,475	100%	673,163,700	100%	1,104,516,200	100%	1,214,967,820	100%	1,336,464,602
				13 Pemilahan penataan dan alih media arsip SKPD	Cakupan arsip SKPD yang mendapatkan pemilahan		1 paket	583.65	-	-	-	-	-	-	-	-
					penataan dan alih media											
				Pengelolaan Arsip In Aktif Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip in aktif		-	-	3 PD	459.97	3 PD	576.27	3 PD	633.90	3 PD	697.29
				14 Updating materi diorama	Jumlah materi diorama yang diupdate		5 materi	47.27	5 materi	213.19	5 materi	180.48	5 materi	198.53	5 materi	218.38
				15 Wisata arsip anak sekolah dan lansia	Jumlah pelaksanaan kegiatan wisata arsip		-	-	-	-	45 kali	347.77	90 kali	382.55	90 kali	420.80
				Pameran Arsip dalam rangka HUT Mangupura di												

Tabel 5.3
Rencana Program dan Kegiatan Strategis, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2017 - 2021
Diskerpus Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra SKPD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			3	FUNGSI PENUNJANG URUSAN				3,553,083,675.00		5,489,730,400.00		8,416,246,800.00		9,257,871,480.00		10,385,200,439.00	
	kearsipan sesuai	kearsipannya sesuai aturan yang		Pembinaan Penyusutan Arsip In Aktif pada SKPD	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti pembinaan penyusutan arsip in aktif		18 PD dan 12 Desa/Kelurahan	22.31	-	-	-	-	-	-	-	-	
	peraturan	berlaku		Pembinaan Arsip Dinamis Aktif di Lingkungan Pemerintah Kab. Badung	Jumlah pemagkat daerah yang mengikuti pembinaan arsip dinamis aktif		18 PD dan 12 Desa/Kelurahan	26.73	-	-	-	-	-	-	-	-	
	perundang-undangan			Pembinaan Penataan Arsip In Aktif di Lingkungan Pemerintah Kab. Badung	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti pembinaan penataan arsip in aktif		18 PD dan 12 Desa/Kelurahan	12.74	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Penataan Arsip Pada Desa Lomba Tingkat Provinsi	Jumlah desa yang mendapatkan penataan arsip pada desa lomba tingkat propinsi		2 Desa/Kelurahan	25.92	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Pembinaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah perangkat daerah dan desa yang mengikuti pembinaan kearsipan		-	-	97 unit kerja	97.68	97 unit kerja	97.68	97 unit kerja	107.45	97 unit kerja	118.20	
				Penataan arsip pada desa untuk mendukung lomba desa terpadu	Jumlah desa peserta lomba desa terpadu		-	-	5 desa	20.84	5 desa	20.84	5 desa	22.92	5 desa	25.21	
				Penyusunan peraturan Bupati tentang pedoman penyusutan arsip pemerintah kabupaten badung	Jumlah Perbup yang tersusun		-	-	1 peraturan	88.36	1 peraturan	87.19	3 peraturan	106.91	1 peraturan	117.60	
				Penyusunan peraturan tentang pedoman pembuatan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis	Jumlah peraturan yang tersusun		-	-	1 peraturan	157.65	1 peraturan	173.42	1 peraturan	190.76	1 peraturan	209.84	
				Monitoring dan evaluasi kearsipan di Kabupaten Badung	Jumlah perangkat daerah dan desa yang mengikuti movev		53 SKPD,46 Desa, 30 TU sekolah	93,337,700	30 Perangkat Daerah	11.58	-	-	-	-	-	-	
				Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan internal kearsipan di Kabupaten Badung	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi		-	-	-	-	35 Perangkat/ka Daerah	173.34	35 Perangkat/ka Daerah	190.67	-	209.74	
				Audit kearsipan internal di Kabupaten Badung	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti audit		-	-	10 desa	213.62	10 desa	213.62	10 desa	234.98	10 desa	258.48	
				Penyusunan produk-produk hukum tentang kearsipan dan perpustakaan	Jumlah produk hukum yang disusun		-	-	3 peraturan	270.00	4 peraturan	476.09	4 peraturan	523.70	4 peraturan	576.07	
				Sosialisasi produk-produk hukum tentang kearsipan dan perpustakaan	Jumlah perangkat daerah dan desa yang mengikuti sosialisasi		-	-	38 PD, 62 Desa	139.29	38 PD, 62 Desa	93.04	38 PD, 62 Desa	102.34	38 PD, 62 Desa	112.57	
				Akreditasi Kearsipan	Jumlah perangkat daerah yang terakreditasi		-	-	-	-	1 PD	422.06	1 PD	464.26	1 PD	510.69	
				Penilaian pengelolaan arsip antar perangkat daerah di Kabupaten Badung	Jumlah pengloa arsip perangkat daerah yang mengikuti lomba kearsipan		-	-	-	-	34 Perangkat/ka Daerah	142.67	34 Perangkat/ka Daerah	156.94	34 Perangkat/ka Daerah	172.64	
		Jumlah tenaga kearsipan yang mempunyai kemampuan mengelola arsip dengan baik		5	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Jumlah sumber daya aparatur yang meningkat kualitasnya		35 PD dan 62 Desa	277,269,900	35 PD dan 62 Desa	797,906,940	35 PD dan 62 Desa	2,434,861,600	35 PD dan 62 Desa	2,678,347,760	35 PD dan 62 Desa	2,946,182,536
					Bimtek Kearsipan Bagi tenaga Pengelola Arsip di Lingkungan Pemerintah Kab. Badung	Jumlah peserta bimtek kearsipan		53 SKPD,46 Desa, 30 TU sekolah	93.34	129 orang	153.24	139 orang	877.74	139 orang	965.51	139 orang	1,062.06
					Bimbingan Teknis Tata Cara Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Pemerintah Kab. Badung	Jumlah peserta bimtek JRA		40 orang	68.95	40 orang	75.85	-	-	-	-	-	-
					Bimbingan Teknis Penyusunan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Jumlah peserta bimtek Penyusunan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip		-	-	-	-	40 orang	87.66	40 orang	96.42	40 orang	106.07
		Jumlah tenaga pengawas kearsipan yang mempunyai kemampuan pengelolaan arsip yang baik		5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang meningkat kualitasnya		189 Orang	-	301 orang	81,245,300	301 orang	451,860,900	301 orang	497,046,900	301 orang	546,751,689
					Bimtek Pengawasan Kearsipan di Kab. Badung	Jumlah peserta bimtek pengawas kearsipan		-	-	40 orang	81.25	40 orang	451.86	40 orang	497.05	40 orang	546.75
	Meningkatnya	Jumlah kunjungan perpustakaan		19	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah kunjungan perpustakaan keliling		60 kali	87,111,700	76 kali	377,154,200	76 kali	550,280,900	76 kali	605,308,900	76 kali	665,839,889
	budaya gemar	keliling			Silang Layanan Bahan Pustaka	Jumlah perpustakaan sekolah yang mendapatkan pelayanan silang layanan bahan		30 perpustakaan	27.87	30 perpustakaan	29.17	30 perpustakaan	15.46	30 perpustakaan	17.01	30 perpustakaan	18.71
	membaca				Pelayanan Perpustakaan Keliling	Jumlah pelaksanaan perpustakaan keliling		60 kali	35.35	76 kali	36.19	76 kali	121.25	76 kali	133.38	76 kali	146.72
					Pembinaan pengembangan minat baca	Jumlah peserta pembinaan pengembangan minat baca		6 orang	23.89	-	-	-	-	-	-	-	-
					Lomba Minat Baca	Jumlah peserta lomba minat baca		-	-	6 orang	156.92	6 orang	156.92	6 orang	172.61	6 orang	189.88
					Gebyar Badung Membaca	Jumlah peserta gebyar badung membaca		-	-	2000 orang	154.87	2000 orang	256.64	2000 orang	282.31	2000 orang	310.54
					Penelusuran, Penghimpunan, Pengelolaan naskah kuno dan koleksi daerah non lantar	Jumlah naskah kuno dan koleksi daerah non lantar yang ditelusuri		-	-	-	-	2 naskah	24.19	2 naskah	26.61	2 naskah	29.27
		Persentase perpustakaan yang memenuhi standar perpustakaan		19	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan		11000 orang	44,824,100	11000 orang	291,181,100	13750 orang	274,975,700	17188 orang	302,473,270	21485 orang	332,720,597
					Pembinaan dan evaluasi perpustakaan di Kabupaten Badung	Jumlah perpustakaan yang dibina dan dievaluasi di Kab. Badung		76 perpustakaan	44,824,100	-	-	-	-	-	-	-	-
					Pengembangan Input Data Nomor Pokok Perpustakaan	Jumlah perpustakaan sekolah yang memiliki app		-	-	70 perpustakaan sekolah	26.35	70 perpustakaan sekolah	26.35	70 perpustakaan sekolah	28.98	70 perpustakaan sekolah	31.88
					Pembinaan dan penilaian lomba perpustakaan desa dan sekolah dalam rangka lomba tingkat provinsi	Jumlah perpustakaan desa dan sekolah yang dibina		-	-	3 perpustakaan	17.81	2 perpustakaan	20.17	2 perpustakaan	22.19	2 perpustakaan	24.41
					Monitoring dan evaluasi perpustakaan desa dan sekolah di Kabupaten Badung	Jumlah perpustakaan desa dan sekolah yang dimonitoring dan dievaluasi		-	-	107 perpustakaa	48.37	69perpustakaan	82.37	69perpustakaan	90.60	69perpustakaan	99.66
					Pembinaan perpustakaan desa dan sekolah di Kabupaten Badung	Jumlah perpustakaan desa dan sekolah yang dibina		-	-	138 perpustakaan	48.21	69perpustakaan	80.40	69perpustakaan	88.44	69perpustakaan	97.28
					Penilaian pengelolaan perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dinilai		-	-	30 perpustakaan	150.00	30 perpustakaan	65.69	30 perpustakaan	72.26	30 perpustakaan	79.48
		Jumlah tenaga pengelola perpustakaan yang mempunyai kemampuan mengelola perpustakaan dengan baik meningkat		5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang meningkat kualitasnya		189 Orang	42,275,000	301 orang	48,208,400	301 orang	142,614,800	301 orang	156,876,280	301 orang	172,563,908
				10	Bimbingan teknis tenaga pengelola perpustakaan di kabupaten Badung	Jumlah peserta bimtek tenaga pengelola perpustakaan		60 orang	42.28	60 orang	48.21	122 orang	142.61	122 orang	156.88	122 orang	172.56

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungja wah.	Lokasi
Target	Rp. Juta		
18	19	20	21
	31,651,793,922.70	diskerpus	Kabupaten Badung
	31,651,793,922.70	diskerpus	Kabupaten Badung
74424000 orang	7,299,046,900	diskerpus	Kabupaten Badung
74424000 orang	2,085.03	diskerpus	Kabupaten Badung
40950 eksemplar	365.37	diskerpus	Kabupaten Badung
40950 eksemplar	1,573.02	diskerpus	Kabupaten Badung
4 kali	888.66	diskerpus	Kabupaten Badung
33480 orang	1,402.06	diskerpus	Kabupaten Badung
	.00	diskerpus	Kabupaten Badung
	.00	diskerpus	Kabupaten Badung
136000 eksemplar	13.46	diskerpus	Kabupaten Badung
1384 orang	267.77	diskerpus	Kabupaten Badung
1 ruangan	702.78		
74 dokumen	1,330,130,651	diskerpus	Kabupaten Badung
		diskerpus	Kabupaten Badung
4100 box	3,308.34	diskerpus	Kabupaten Badung
1600 box	426.39	diskerpus	Kabupaten Badung
360 dokumen	502.94	diskerpus	Kabupaten Badung
36 PD	400.80	diskerpus	Kabupaten Badung
	4,376,380,797	diskerpus	Kabupaten Badung
1 paket	583.65	diskerpus	Kabupaten Badung
12 PD	2,367.42	diskerpus	Kabupaten Badung
25 materi	857.84	diskerpus	Kabupaten Badung
	1,151.11	diskerpus	Kabupaten Badung
74424000 orang	1,044,321,677	diskerpus	Kabupaten Badung
27050 eksemplar	882.11	diskerpus	Kabupaten Badung
1600 cover	13.44		
76 sekolah	148.77	diskerpus	Kabupaten Badung
36 PD dan 62 Desa	5,583,686,188	diskerpus	Kabupaten Badung

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Tahun 2021)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungja wah.	Lokasi
Target	Rp. Juta		
18	19	20	21
	31,651,799,922.70	diskerpus	Kabupaten
18 PD dan 12 Desa/Kelurahan	22.31		
18 PD dan 12 Desa/Kelurahan	26.73	diskerpus	Kabupaten Badung
18 PD dan 12 Desa/Kelurahan	12.74	diskerpus	Kabupaten Badung
2 Desa/Kelurahan	25.92	diskerpus	Kabupaten Badung
35 PD dan 62 Desa	421.01	diskerpus	Kabupaten Badung
20 desa	89.81	diskerpus	Kabupaten Badung
8 perbup	410.07	diskerpus	Kabupaten Badung
4 peraturan	731.67	diskerpus	Kabupaten Badung
30 PD	104.92	diskerpus	Kabupaten Badung
35 Perangkat Daerah	573.75	diskerpus	Kabupaten Badung
35 PD	920.69	diskerpus	Kabupaten Badung
15 peraturan	1,845.87	diskerpus	Kabupaten Badung
38 PD, 62 Desa	447.24	diskerpus	Kabupaten Badung
1 PD	1,397.00	diskerpus	Kabupaten Badung
34 Perangkat Daerah	472.25	diskerpus	Kabupaten Badung
35 PD dan 62 Desa	3,296,696,123	diskerpus	Kabupaten Badung
685 orang	3,151.89	diskerpus	
200 orang	144.80	diskerpus	
120 orang	290.15	diskerpus	
1393 orang	1,576,904,879	diskerpus	
160 orang	1,576.90	diskerpus	Kabupaten Badung
364 kali	2,285,695,679	diskerpus	
150 perpustakaan	108.22	diskerpus	Kabupaten
364 kali	472.89	diskerpus	Badung
6 orang	23.89	diskerpus	
6 orang	676.33	diskerpus	Kabupaten
8000 orang	1,004.36	diskerpus	Badung
74424000 orang	1,246,174,767	diskerpus	
	44.82		Kabupaten
280 perpustakaan	113.57		Badung
12 perpustakaan	84.59	diskerpus	
314 perpustakaan	321.44	diskerpus	
345 perpustakaan	314.33	diskerpus	Kabupaten
90 perpustakaan	367.43	diskerpus	Badung
	562,538,388.000	diskerpus	Kabupaten
300 orang	562.54	diskerpus	Badung

BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BADUNG YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Didalam RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Badung. Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD tersebut.

Indikator Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 6.1 dibawah ini.

Tabel 6.1

Indikator kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase Kunjungan ke perpustakaan	1.9	1.9	2.37	2.97	3.71	3.71%
2	Persentase penggunaan TI dalam pengelolaan kearsipan	0	10	20	30	40	40
3	Persentase penggunaan TI dalam pengelolaan perpustakaan	10	20	30	40	50	50
4	Persentase PD dan Desa yang kearsipannya sesuai aturan yang berlaku	10%	10%	10%	10%	10%	50%
5	Jumlah tenaga kearsipan yang mempunyai kemampuan mengelola arsip dengan baik	129 org	139 org	139 org	139 org	139 org	695 orang
6	Jumlah tenaga pengawas kearsipan yang mempunyai kemampuan pengelolaan arsip yang baik	-	40 org	40 org	40 org	40 org	200 orang
7	Jumlah kunjungan perpustakaan keliling	60 kali	76 kali	76 kali	76 kali	76 kali	364 kali
8	Persentase perpustakaan yang memenuhi standar Perpustakaan Nasional RI	20%	30%	40%	50%	60%	60%
9	Jumlah tenaga pengelola mempunyai kemampuan mengelola perpustakaan dengan baik	60 org	122 org	122 org	122 org	122 org	548 orang